

### **BAB III**

## **NARASI NASIONALISME PAPUA SEBAGAI AKIBAT DARI REALITAS POLITIK DI PAPUA**

Perjalanan Indonesia menjadi suatu negara memiliki sejarah panjang melawan kolonialisme. Setelah berhasil memproklamkan kemerdekaan, Indonesia kemudian menjadi negara yang berdaulat. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat kata yang sungguh suci bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya negara Indonesia berdiri kemudian mendeklarasikan untuk melawan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Sayang amanat suci yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dicerai dengan Indonesia yang menganeksasi kemerdekaan Papua. Papua yang pada waktu itu sedang dipersiapkan kemerdekaannya seketika digagalkan dengan masuknya Indonesia ke Papua. Proses pengambil-alihan Papua melalui serangkaian dinamika yang panjang mulai dari diplomasi sampai ketegangan militer. Yang menyedihkan adalah orang Papua hanya dijadikan objek oleh dua negara yang berseteru yaitu Belanda dan Indonesia. Usaha masuknya Indonesia ke Papua bukannya tanpa masalah. Sepanjang tahun 1963-1969 yang merupakan tahun dimana Indonesia sedang melakukan proses mengambil Papua, serentetan kekerasan hingga pembunuhan mewarnai tahun-tahun awal pendudukan Indonesia.

Berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terjadi sepanjang tahun 1963 sampai 1969 merupakan bukti janggalnya Papua masuk ke Indonesia. Tahun-tahun sebelum 1963, Papua merupakan daerah yang masih diduduki oleh Belanda.

Pada tahun 1950an tuntutan melawan kolonialisme semakin merebak di penjuru dunia. Tidak terkecuali kelompok-kelompok elit di Papua yang pada waktu itu sudah mewacanakan kemerdekaan Papua. Atas berbagai desakan, kemudian Belanda berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Papua. Usaha-usaha tersebut diantaranya Belanda mendirikan sekolah untuk calon pegawai negeri dalam upaya mempersiapkan birokrasi setelah Papua merdeka. Belanda juga menjanjikan kemerdekaan Papua pada tahun 1970. Pada tahun 1961 Belanda mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora dan deklarasi kemerdekaan Papua. Tetapi usaha tersebut buyar ketika Indonesia hadir untuk menolak pendirian negara Papua dan mengklaim bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Papua menjadi bagian dari Indonesia secara resmi setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Tahun-tahun sebelum dilaksanakannya pepera, Indonesia melakukan tindakan-tindakan represif guna menekan gerakan-gerakan yang pro kemerdekaan Papua. Pepera sendiri dipertanyakan keabsahannya oleh sebagian masyarakat Papua yang menganggap bahwa pepera tidak merepresentasikan rakyat Papua. Hal ini disebabkan karena pepera menggunakan sistem perwakilan bukan satu orang satu suara.

Semenjak Papua diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963 sampai saat ini, persoalan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan terhadap orang Papua seakan tidak ada habisnya. Persoalan ini seperti mengkristal yang membuat penderitaan-penderitaan menimpa orang Papua. Mulai dari pelanggaran HAM, marjinalisasi, ketimpangan ekonomi menjerat tanah Papua dari tahun-ke tahun. Semacam terdapat perlakuan yang berbeda kepada Papua dari negara Indonesia. Gerakan-

gerakan kritis di Papua sering kali dipadamkan bahkan direpresi dengan dalih gerakan separatis.

Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Indonesia melalui aparaturnya memunculkan gerakan-gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan yang paling awal menentang keberadaan Indonesia di tanah Papua yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM didirikan pada Tahun 1964. Setelah didirikan, OPM melancarkan serangan-serangan melalui jalur militer. Infiltrasi Indonesia di Papua kemudian pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan menjadi latar belakang OPM untuk bergerak. OPM Sendiri memiliki berbagai faksi didalamnya, tak jarang juga terjadi perpecahan di internal organisasi. Antara tahun 1964 dan 1998, OPM merupakan lambang perjuangan Papua untuk kemerdekaan dan menjadi kiblat identifikasi bagi sebagian besar pemimpin Papua dan elit papua dipengasingan (Din, 2010). OPM menjadi simbol perlawanan Papua terhadap Indonesia dan menjadi antitesis yang mengatakan bahwa hadirnya Indonesia di Papua merupakan keluhuran negara Indonesia.

Menurut (Aditjondro, Bintang Kejora di tengah kegelapan Malam, 1993) yang mencoba menganalisis perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh aktor-aktor Papua, Dia mengatakan bahwa telah tumbuh kesadaran nasionalisme Papua. Dalam penelitiannya yang fokus pada kurun waktu 1965 – 1988, dia menemukan 5 evolusi dalam nasionalisme Papua. Pertama yaitu berdirinya OPM di Manokwari yang menjadi simbol pertama gerakan melawan Indonesia dan tumbuhnya nasionalisme Papua. Tokoh pemimpinya adalah Johan Ariks. kedua yaitu setelah pembontakan OPM berhasil dipadamkan oleh pemerintah Indonesia, pada 1 Juli 1971 proklamasi OPM kedua tercetus. Pencetusnya adalah

Seth Jafet Rumkorem seorang bekas bintara yang di didik oleh Indonesia. Kekesalannya melihat pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan menjelang pepera membuat Rumkorem ikut bergabung dan bergerilya dengan OPM. Ketiga pada 3 Desember 1974 para aktivis OPM mengimajinasikan negara merdeka yang mereka cita-citakan tidak hanya sebatas di propinsi New Guinea Barat tetapi sampai Papua Nuigini. Mereka menyatakan merdeka 100% di luar Republik Indonesia. keempat yaitu pada tanggal 26 April 1984, terjadi penembakan terhadap budayawan Arnold Ap. Arnold Ap dieksekusi karena dianggap menjadi penghubung OPM dengan simpatisan yang ada di Kota. Selain tu, grup musik mambesak yang didirikannya dianggap membahayakan kedudukan NKRI di tanah Papua karena mengangkat kebudayaan-kebudayaan Papua dan membangkitkan nasionalisme Papua. Terbunuhnya Arnold Ap justru menyatukan gerakan-gerakan kemerdekaan Papua yang sebelumnya terfragmentasi. Kelima, terdapat proklamasi proklamasi dan pengibaran bendera OPM yang dilakukan oleh Tom Wanggai pada tanggal 14 Desember 1988. pada saat itu dikibarkan bendera melanesia barat bukan Papua barat.

Gerakan-gerakan sepanjang tahun 1965-1988 tersebut membuktikan adanya perlawanan terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia sekaligus mengindikasikan adanya suatu nasionalisme Papua yang masing-masing memiliki perbedaan cara pandang. Gerakan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh ketidak-puasan kepada Indonesia dan menghendaki adanya negara yang terlepas dari Indonesia. Mulai dari keganjilan sejarah, perlakuan sewenang-wenang, kemudian merasa tidak terwakili dan pepera membuat gerakan-gerakan pro kemerdekaan muncul.

Kini di Kota-Kota besar di Jawa khususnya Yogyakarta terdapat organisasi mahasiswa yang konsisten menyerukan kemerdekaan Papua. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) konsisten dalam menyerukan kemerdekaan Papua. mereka merupakan intelektual-intelektual muda Papua yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia. AMP fokus pada kajian-kajian memahami persoalan yang terjadi di Papua. Pada momen-momen tertentu AMP melakukan aksi demonstrasi menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Ketika gerakan-gerakan pro kemerdekaan terdahulu tampil melalui jalur militer dan kebudayaan, AMP tampil dengan kalangan muda terdidik dan melalui jalur yang bisa dikatakan lebih lembut.

Persamaan AMP dengan perjuangan kemerdekaan Papua yang lain adalah latar belakang yang mendasari mereka untuk bergerak. Sejarah yang mengatakan bahwa janji kemerdekaan sempat diberikan kemudian kondisi penindasan, kesewenang-wenangan di bawah kekuasaan Indonesia membuat aspirasi menuntut kemerdekaan itu menyeruak. Pelanggaran HAM, marginalisasi, stigmatisasi, dan pembangunan yang tidak partisipatif semakin membuat tanah Papua bergejolak. Hal tersebut juga yang pada akhirnya membawa pada soal kebangsaan. Pada kesadaran nasional yang tumbuh bahwa antara Indonesia dan Papua adalah suatu yang liyan. Tentunya tumbuhnya kesadaran nasional tersebut berdasarkan kondisi-kondisi real yang telah di lalui rakyat Papua.

Lengsernya Soeharto menjadi awal yang cerah bagi gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan. Jatuhnya Soeharto dari tapuk kepemimpinan membuat ruang demokrasi kembali terbuka. Suara-suara yang sekian lama di bungkam oleh rezim akhirnya menyeruak ke permukaan. tidak terkecuali suara-suara dari Papua

terkait apa yang terjadi selama ini di sana. Setelah kejatuhan Soeharto, di Papua terjadi gejolak besar-besaran terutama hak untuk menentukan nasib sendiri. Banyak aspirasi masyarakat Papua mulai bangkit untuk menyerukan kemerdekaan.

AMP juga merupakan salah satu gerakan yang muncul setelah rezim Soeharto. AMP Berdiri pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Pada waktu itu setelah Soeharto tumbang dan suara-suara dari Papua mulai muncul, beberapa mahasiswa Papua yang berada di Jawa berkumpul untuk membentuk suatu organisasi. Banyak dari mahasiswa Papua yang berfikir harus ada organisasi mahasiswa yang lebih konsisten untuk melihat persoalan-persoalan Papua. terjadi gejolak besar-besaran di Papua setelah Soeharto lengser. di Wamena, Nabire, Fak-fak dan hampir seluruh daerah mengibarkan bendera simbol nasional Papua, yaitu bintang kejora. Pengibaran bendera itu kemudian diikuti dengan serangkaian kekerasan dan pembunuhan kepada rakyat Papua. peristiwa tersebut secara umum dikenal dengan peristiwa Biak berdarah.

Peristiwa Biak berdarah adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat Papua yang dilakukan oleh militer. Masyarakat Papua ingin mempertahankan bendera kebanggaan nasional kemudian diserang oleh aparat. Tindakan biadab yang diterima rakyat sipil, hanya karena mempertahankan Sang Bintang Fajar yang dikibarkan pada sebuah menara air setinggi 35 di dekat pelabuhan laut Kota Biak. Aksi damai yang dilakukan 500 – 1.000 masa itu berakhir dengan apa yang dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah, 6 Juli 1998 (Tabloid Jubi, 2014). Berdasarkan laporan investigasi pelanggaran HAM dari lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua berjudul “Nama

Tanpa Pusara. Pusara Tanpa Nama”, yang sudah diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebutkan, terdapat korban meninggal dunia 8 orang, hilang 3 orang, luka berat 4 orang yang sempat dievakuasi ke makassar, Sulawesi Selatan, luka 33 orang, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan 50 Orang, serta mayat misterius 32 orang (Suara Papua, 2017).

Peristiwa Biak berdarah semakin memantapkan AMP untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Di saat banyak aspirasi masyarakat Papua yang mulai muncul, negara justru merespon dengan kesewenang-wenangan yang berujung pada penghilangan nyawa masyarakat sipil. Seperti yang dikatakan Douw

Biak berdarah setelah adanya pengibaran bendera di tower Biak waktu itu. Di situ ada Filep Karma juga, orang yang mendorong kemerdekaan. Setelah pengibaran di Biak banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Setelah peristiwa berdarah waktu itu di Biak kemudian mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa, Bali, Makasar, mulai mengaspirasikan soal itu dan negara harus bertanggung jawab soal itu. Jadi awal-awal pemikiran untuk pembentukan AMP sendiri itu dari peristiwa Biak berdarah. “Setelah itu banyak dari mahasiswa-mahasiswa Papua yang mulai berfikir bahwa harus ada organisasi mahasiswa yang lebih konsisten untuk melihat persoalan-persoalan Papua” (wawancara 15 Januari 2018).

AMP dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalamat pahit yang menimpa Papua. Mahasiswa Papua mulai berfikir bahwa perjuangan Papua juga harus diikuti oleh mahasiswa Papua yang konsisten melihat persoalan di Papua. Sehingga AMP memiliki visi membebaskan negeri West Papua dari segala macam bentuk penindasan penjajahan bagi umat manusia dan menciptakan rakyat

West Papua yang berdaulat secara politik, dengan pembentukan negara West Papua yang mandiri (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Dengan kata lain AMP bertujuan untuk mendirikan negara West Papua dan melawan segala bentuk penindasan.

Sepanjang sejarah melawan penindasan, mahasiswa atau kalangan muda selalu memiliki tempat tersendiri. Demikian juga sejarah melawan kolonialisme, kalangan muda tertitik menjadi kelompok yang lantang dalam melawan kolonialisme. Kalangan muda dikenal mempunyai semangat juang yang tinggi. Terlebih mahasiswa yang dianggap memiliki intelektual dan idealisme yang lebih. Dalam hal ini AMP sebagai organisasi yang di huni oleh kaum muda mahasiswa ikut turut ambil bagian dalam perjuangan pembebasan Papua. Mahasiswa yang tergabung di dalam AMP mencoba keluar dari belenggu penindasan dan hegemoni pendidikan di Indonesia.

AMP Komite Kota Yogyakarta (AMP KK Yogyakarta) merupakan bagian integral dari AMP. Pada dasarnya apa yang membuat AMP KK Yogyakarta bergerak sejalan dengan pandangan AMP secara umum. Tidak ada yang membedakan antara AMP KK Yogyakarta dengan AMP KK yang lain ataupun AMP Komite Pusat karena mereka dibentuk dalam satu kesatuan. Akan tetapi, dalam berjalannya waktu AMP KK Yogyakarta juga memiliki cerita tersendiri. Berkaitan dengan perlawanannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. termasuk juga pandangan secara khusus dari AMP KK Yogyakarta dalam menyoroti persoalan di Papua.

Sepanjang perjalanan AMP KK Yogyakarta terdapat pasang surut organisasi. AMP KK Yogyakarta sendiri mulai aktif dan masif dalam aktivitas



organisasi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 AMP KK Yogyakarta memiliki kenaikan dalam segi aktivitas organisasi maupun anggota.

Nah dalam masa perjalanannya memang hampir tenggelam kemudian bangkit lagi. yang paling nampak itu pada tahun 2008 ada eksodus mahasiswa Papua. Jadi mahasiswa semua pulang ke Papua kemudian membuat aksi di Papua. Pada tahun 2008-2009 setelah eksodus waktu itu aktifitas AMP Yogyakarta menurun kemudian 2010 mulai bangkit, 2011 ada isu yang berkembang bahwa akan terjadi peristiwa semacam peristiwa timor leste. Jadi banyak teman-teman yang balik ke Papua pada tahun 2011. Setelah itu mulai menurun kemudian naik kembali setelah tahun 2011 (wawancara 15 Januari 2018).

Apabila kita menelaah secara singkat beberapa topik yang sudah dipaparkan di atas maka terdapat tiga persoalan utama yaitu sejarah Papua, hadirnya Indonesia di Papua, kemudian Perlawanan rakyat Papua. Permasalahan tersebut kemudian meruncing dan tak kunjung selesai. Hadirnya kelompok-kelompok masyarakat serta mahasiswa Papua yang mengimajinasikan negara baru merupakan indikasi adanya persoalan kebangsaan. Kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan dan kemerdekaan Papua juga bervariasi. Hal ini menunjukkan masing-masing kelompok yang memiliki cara pandang atau pembacaan masalah sendiri-sendiri. Namun telah terlihat nasionalisme Papua yang tumbuh pada gerakan-gerakan tersebut. Secara khusus disini akan membahas pembacaan persoalan nasionalisme Papua dari AMP KK Yogyakarta.

Persoalan kebangsaan sendiri sangat rumit bagi suatu negara. Akan tetapi sebenarnya negara melalui pemerintahannya memiliki cara untuk menangani masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan berlangsung secara dialektik. Mulai dari bagaimana negara membangun kebangsaan, kemudian tanggapan warga negara dalam merespon apa yang dilakukan pemerintah.

#### A. Pembangunan Bangsa oleh Indonesia di Papua

Pembangunan bangsa merupakan suatu hal yang unik di dalam negara. Pembangunan negara agaknya lebih muda dibandingkan dengan pembangunan bangsa. terdapat perbedaan antara pembangunan negara dan bangsa. Pembangunan bangsa adalah penciptaan sebuah komunitas yang terikat bersama oleh sejarah dan budaya dan berada di luar kemampuan kekuatan luar untuk mencapainya (Fukuyama, 2004). Artinya pembangunan bangsa memiliki titik pijak sejarah dan budaya sebagai hal yang utama. Penciptaan sebuah komunitas yang memiliki persamaan sejarah dan budaya tersebut tidak bisa di capai oleh kekuatan diluar dari komunitas. Ini yang membuat pembangunan bangsa lebih unik dibandingkan pembangunan negara.

Persoalan Papua sangat erat kaitannya dengan pembangunan kebangsaan. Nasionalisme Papua merupakan bagian dari gagalnya pembangunan kebangsaan oleh Indonesia di Papua. Sebelum menelisik lebih jauh perihal nasionalisme Papua yang tumbuh di kalangan muda, disini akan di bahas terlebih dahulu pembangunan kebangsaan yang dilakukan oleh Indonesia. Karena nasionalisme Papua dan pembangunan bangsa yang dilakukan oleh Indonesia tidak bisa dipisahkan satu sama lain, keduanya berhubungan secara dialektik.

Pembangunan bangsa sendiri melalui serangkaian proses rill yang terjadi di masyarakat. Karena bangsa lebih dari sekedar pembayangan suatu komunitas. Penopang dalam proses pembangunan bangsa adalah pengalaman atas realitas, dan pengalaman atas suatu realitas di mana hubungan-hubungan

material antar orang dan pengalamannya yang nyata mulai menempa bukan sekedar hubungan-hubungan “yang dibayangkan”, melainkan hubungan-hubungan yang dialami secara aktual-dialami karena ia material dan nyata (Lane, 2017). Dengan kata lain bangsa adalah suatu gambar yang lahir dari pengalaman dan tafsirannya terhadap pengalaman itu (Lane, 2017).

Bahkan Fukuyama (2004) mengatakan bahwa bangsa semata-mata adalah bonus dari pembangunan negara. Ini semua tentunya tidak terlepas dari apa yang dikatakannya bahwa pembangunan bangsa berada di luar kemampuan kekuatan luar untuk mencapainya. Namun menurut Fukuyama (2004) terdapat tiga aspek yang bisa dilakukan pihak luar atau negara dalam pembangunan bangsa. *Pertama* berkaitan dengan apa yang disebut pembangunan pasca konflik. Apabila negara sama sekali hancur lebur maka di sini persoalan bagi kekuatan-kekuatan luar adalah penyediaan stabilitas jangka pendek dengan memasukan pasukan keamanan, polisi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan teknis. *Kedua* Menciptakan lembaga-lembaga negara yang swadaya yang dapat terus berjalan dengan ditariknya campur tangan luar. *Ketiga* penguatan negara-negara lemah dimana terdapat otoritas negara dalam bentuk yang cukup stabil namun tidak dapat menjalankan fungsi-sungsi negara yang dibutuhkan seperti perlindungan hak milik pribadi atau penyediaan pendidikan dasar.

#### 1. Pembangunan Pasca Konflik yang Tidak Pernah Selesai

Pertama berkaitan dengan pembangunan pasca konflik. Fukuyama (2004) mengatakan apabila negara sama sekali hancur lebur. Tentunya naif apabila

mengatakan bahwa yang terjadi di Papua adalah kondisi negara sedang hancur lebur. Kondisinya memang tidak separah itu karena kehidupan di Papua masih tetap berlangsung. Tetapi ada persoalan yang sangat akut dan bertahun-tahun tidak terselesaikan. Persoalan kebangsaan Indonesia di Papua ada semenjak Papua belum masuk kedalam NKRI dan sampai saat ini belum terselesaikan. Sehingga teori Fukuyama ini akan sangat membantu dalam melihat pembangunan bangsa di Papua khususnya di tahap pertama yaitu pembangunan pasca konflik.

Bagi Fukuyama (2004) tahap awal yang bisa dilakukan dalam pembangunan bangsa adalah memasukan pasukan keamanan, polisi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan teknis. Bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah melakukan itu semua untuk melakukan pembangunan bangsa di Papua. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah dengan telah melakukan itu semua dengan sesuai?. Sejarah Papua adalah serangkaian kekerasan yang bertubi-tubi menimpa masyarakat. Indonesia melalui aparaturnya (baca: TNI) menindas masyarakat Papua yang dianggap separatis dengan cara kekerasan bahkan tidak tanggung-tanggung sampai berujung pembubuhan.

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam Papua Road Map, *Negotiating the past, improving the present and securing the future* (Widjono dkk, Papua Road Map, 2009) terdapat tiga periode kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Indonesia melalui aparaturnya kepada rakyat Papua. *Pertama* masa kekerasan yang terjadi pada kurun waktu antara tahun 1961 sampai tahun 1969. Kekerasan ini memiliki dua tujuan yaitu infiltrasi Indonesia untuk menggagalkan kemerdekaan Papua dan Konsolidasi

menjelang pepera untuk memastikan kemenangan Indonesia. Kekerasan periode ini menasar kelompok elit-elit perkotaan yang mencoba melawan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Papua. Pada masa inilah OPM pertama kali muncul sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Periode Kedua berlangsung dalam kurun waktu tahun 1970 sampai 1977. Kekerasan ini bertujuan untuk mempertahankan kehadiran Indonesia di Papua. Kekerasan ini ditujukan kepada semua gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Papua mengenai hasil pepera. Kekerasan juga bertujuan untuk menjamin keamanan pada investasi PT Freeport Indonesia di Papua. Selain itu kekerasan juga ditujukan untuk memenangkan Golkar pada Pemilu tahun 1971 dan memastikan jalannya birokrasi pemerintahan.

Periode ketiga lebih dikenal sebagai era Daerah Operasi Militer. Kekerasan pada periode ini bertujuan untuk melancarkan pembangunan versi Indonesia. Pembasmian orang-orang yang dianggap OPM dilakukan sampai kampung-kampung di Papua. Pada masa ini juga terjadi pelanggaran HAM besar-besaran, dimana terdapat penghilangan orang juga pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Namun kekerasan yang banyak terjadi adalah di sekitar area PT Freeport Indonesia. Pada era ini pulalah terjadi pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang yang mengkritik jalannya pemerintahan di Papua (Widjoyo dkk, Papua Road Map, 2009). Salah satu tokoh Papua yang terbunuh adalah Arnold Ap budayawan Papua yang terkenal dengan grup musik mambesak.

Total jumlah korban kekerasan di tiga periode di atas masih belum pasti. Namun jumlah korban yang muncul dalam berbagai publikasi meskipun sangat spekulatif berkisar antara 100 ribu jiwa hingga 500 ribu jiwa (Widjoyo dkk, Papua Road Map, 2009). Era Soeharto yang otoriter dan lebih mengedepankan pendekatan militeristik benar-benar membuat penderitaan yang nyata bagi rakyat Papua. Pada masa orde baru nasionalisme Indonesia didefinisikan secara militeristik sehingga konsekuensinya adalah kekerasan-kekerasan bagi mereka yang dianggap membangkang oleh negara.

Pasca reformasi yang di tandai dengan tumbangnya rezim orde baru tidak membuat kekerasan di Papua berhenti. Tahun-tahun 1998 hingga 2006 adalah masa yang diwarnai secara dominan catatan tentang kekerasan politik, utamanya oleh aparat keamanan, baik TNI maupun polisi (Widjoyo, 2006). Peristiwa yang cukup mencolok adalah tragedi biak berdarah yang terjadi Pada tanggal 6 Juli 1998, bulan setelah kejatuhan Soeharto. Masyarakat Papua ingin mempertahankan bendera kebanggaan nasional kemudian diserang oleh aparat. Tindakan biadab yang diterima rakyat sipil, hanya karena mempertahankan Sang Bintang Fajar yang dikibarkan pada sebuah menara air setinggi 35 di dekat pelabuhan laut Kota Biak. disebutkan, terdapat korban meninggal dunia 8 orang, hilang 3 orang, luka berat 4 orang yang sempat dievakuasi ke makassar, Sulawesi Selatan, luka 33 orang, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan 50 orang, serta mayat misterius 32 orang (Suara Papua, 2017).

Setelah orde baru penyelesaian permasalahan dengan pendekatan militer masih terus terjadi di Papua. Salah satu yang mengakibatkan hal itu adalah

stigmatisasi kepada rakyat Papua sebagai kelompok separatis. Sekitar akhir tahun 2014 sampai 2015 terjadi beberapa kekerasan yang dialami rakyat Papua. Diantaranya adalah penembakan di painai yang menewaskan 4 orang pelajar SMP (8 Desember 2014), penembakan kilat, penyiksaan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang yang berulang kali terjadi di Yakuimo (Maret-Oktober 2015), penembakan siswa di Dogiyai (Maret 2015), rekayasa kasus tolikara, 11 warga tolikara ditembak (17 Juli 2015), sementara oknum penembak dilindungi, penembakan di timika menewaskan 2 orang komoro (Oktober 2015), penembakan 2 orang Mappi di merauke (Oktober 2015), penembakan 2 warga Angkaisera, Serui (Desember 2015) (Suryawan, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan masih terus terjadi di Papua sampai saat ini.

Kekerasan menjadi semacam lingkaran setan yang menjerat Papua. Melihat sejarah Papua maka akan dihadapkan dengan serentetan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Masyarakat Papua mengalami pengalaman yang sama yaitu kekerasan. Kekerasan itu kemudian menjadi ingatan kolektif masyarakat Papua. Hal ini diperparah dengan represifitas dari pihak pemerintah kepada pihak yang menyuarakan pelanggaran kekerasan. Dengan demikian rangkaian peristiwa kekerasan yang berlangsung di tanah Papua hanya menjadi ingatan kolektif bangsa Papua di kampung-kampung dan diseluruh penjuru tanah, rawa, pesisir, dan pegunungan (Suryawan, 2017) . Pengalaman orang Papua terhadap serangkaian kekerasan yang menyejarah ini kemudian menjadi ingatan kolektif atau disebut "*memoria passionis*".

Kekerasan di Papua jelas bukan merupakan kekerasan biasa karena didalamnya ada peran negara. Negara hadir di Papua dalam bentuk kekerasan melalui aparaturnya. Kekerasan yang seperti ini dikatakan sebagai kekerasan struktural dimana negara terlibat secara langsung melalui aparaturnya. Rakyat Papua telah dihadapkan pada pengalaman traumatis tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnya.

Kekerasan yang melibatkan aparaturnya sebagai pelaku utama pada gilirannya akan menciptakan ketakutan untuk bersuara. Ketakutan untuk berbicara tersebut sangat berbahaya karena melanggar praktik-praktik kekerasan. Budaya bisu pada akhirnya membuat kekerasan yang terjadi di Papua dianggap sebagai hal wajar. Terlebih kekerasan yang terjadi di Papua adalah kekerasan struktural yang melibatkan struktur dan aparaturnya. Momen-momen tragedi kekerasan melibatkan para aktor, struktur yang mengakibatkan atau mendorong kekerasan berlangsung, serta argumentasi (alasan) yang dikonstruksi agar kekerasan tersebut berlangsung wajar dan terkesan memang bisa diterima terjadi di tengah masyarakat (Suryawan, 2017).

Kita tahu bahwa kekerasan yang terus terjadi kepada rakyat Papua adalah persoalan serius di Indonesia. Kekerasan tersebut menimbulkan rasa traumatis kepada rakyat Papua. *Memoria passionis* tentang kekerasan ini membuat hidup rakyat Papua terkerangkang dalam kurungan yang bisa mengakibatkan hancurnya pandangan akan masa depan. Singkatnya, sangat mungkin terjadinya frustrasi karena melihat kekerasan yang terus dialami. Pengalaman kekerasan dan penderitaan tersebut sangat sulit untuk dihilangkan dari ingatan kolektif



orang Papua, dan sangat berpengaruh secara serius dalam pemahaman diri orang Papua sendiri yang dapat menghancurkan masa depan (Giay, 2000).

Orde baru yang menggunakan pendekatan militer saat menghadapi permasalahan di Papua dan terbukti gagal, tidak menjadi pelajaran bagi pemerintahan selanjutnya. Pendekatan menggunakan cara kekerasan justru merusak rasa sebagai satu bangsa. Pembangunan bangsa hanya menjadi angan-angan karena pendekatan militeristik membuat rakyat Papua merasa mereka diperlakukan bukan sebagai warga negara. Sehingga keinginan untuk merdeka menjadi semakin kuat mengakar di benak rakyat Papua. Mereka merasa tidak diperlakukan sebagai saudar sebangsa sehingga memunculkan rasa bahwa mereka suatu yang liyan. Pendekatan keamanan yang dijalankan oleh militer selama era Pak Harto, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penculikan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya, yang luas, makin menanamkan keinginan yang kuat untuk merdeka (Din, 2010).

Pengalaman akan kekerasan secara terus menerus membuat rakyat Papua merasa menjadi warga kelas dua dalam negara. Seperti yang dikatakan oleh Abbi Douw, ketua AMP KK Yogyakarta “Jadi semacam ada pandangan yang terbangun kalau orang Papua ingin merdeka maka harus dimusuhi. Stigma yang terbangun seperti itu, perlakuan kekerasan seperti ada terus menerus”. Kekerasan menjadi faktor dominan yang membuat rakyat Papua pesimis dengan pemerintah Indonesia. Sejarah penderitaan akan kekerasan inilah yang membuat orang Papua merasa bukan orang Indonesia di beberapa persoalan.

Cukup jelas bagaimana pendekatan secara militeristik tidak membentuk keadaan yang lebih baik di Papua. Cara seperti ini justru menumbuhkan

semangat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kekerasan yang terjadi di Papua menunjukkan mengikisnya rasa kemanusiaan. Akibatnya, pembangunan bangsa justru gagal disebabkan kekerasan-kekerasan yang dilakukan kepada orang Papua. Hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah orang Papua yang merasa dirinya lain dari Indonesia. Disinilah letak pembangunan bangsa yang telah gagal dilakukan oleh Indonesia. Dalam kerangka politik pembangunan dengan nation-building ambition yang menekankan pendekatan keamanan dan negara keamanan ternyata telah gagal mewujudkan ambisi membangun homogenitas sosial-budaya (Karoba dkk, 2005). Harapan imajinasi menjadi satu bangsa gagal dalam tahapan ini.

## 2. Gagalnya pemerintah Indonesia Dalam Menciptakan Stabilitas dan Lembaga yang Swadaya

Tahapan pembangunan bangsa ke 2 yang diajukan oleh Fukuyama (2004) yaitu menciptakan lembaga-lembaga negara yang swadaya yang dapat terus berjalan dengan ditariknya campur tangan dari luar. Tahapan ini adalah upaya negara dalam membuat lembaga untuk menjamin stabilitas di daerah yang akan menjadi target pembangunan bangsa. Membuat lembaga atau upaya-upaya tertentu untuk memastikan aktifitas pemerintahan daerah tersebut berjalan tentunya menjadi sangat vital. Karena pada tahap inilah fondasi awal dalam alur bernegara secara formal di bangun.

Setelah upaya pembangunan pasca konflik, yang kedua adalah bagaimana negara memastikan daerah tersebut dapat berinteraksi dengan pemerintahan. Hal yang dilakukan tentunya membuat aturan dan membentuk lembaga-

lembaga tertentu. Pada konteks Papua sangat sulit untuk melihat tahapan-tahapan pada proses pembangunan bangsa. Tahapan menciptakan lembaga swadaya seharusnya dilakukan setelah konflik dapat di redam. Namun melihat fakta di lapangan adalah konflik terus berkecambuk tak terselesaikan. Apalagi pendekatan kekerasan lebih ditonjolkan oleh Indonesia sepanjang sejarah kependumudukan Indonesia di Papua.

Apa yang terlihat di Papua adalah pembangunan bangsa yang tidak terstruktur. Dalam arti hingga saat ini pembangunan bangsa tahap pertama bisa dikatakan gagal. Sehingga yang terjadi adalah pembangunan bangsa campur-aduk menaggalkan tahapan, dalam hal ini tahapan pembangunan bangsa versi Fukuyama. konsekuensi dari ketidak-aturan tersebut tentunya membuat tahapan yang kedua terkendala.

Upaya yang patut diapresiasi dari usaha pembangunan bangsa oleh Indonesia adalah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Karena tuntutan akan kemerdekaan yang semakin memuncak, untuk menyasati tuntutan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan otsus pada tahun 2001. Di dalam bab 5, yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Papua terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen itu adalah Pemerintah Daerah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan lembaga khusus yang ada di Papua dan merepresentasikan dari segi kultural masyarakat Papua. MRP ini diisi oleh orang asli Papua.

Majelis Rakyat Papua merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (UU Otonomi Khusus Tahun 2001). MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP (UU Otonomi Khusus Tahun 2001). Dengan kata lain bahwa MRP adalah penyeimbang bagi pemerintahan dan jaminan adanya campur tangan orang asli Papua di pemerintahan.

MRP memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dia tur e cara spesifik dalam UU Otonomi khusus pasal 20 yaitu: *pertama* memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRD; Kedua memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRD; ketiga memeberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur; Keempat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua; kelima memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beraga, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak

lanjut penyelesaiannya; keenam Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Wakil mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Otsus yang didalamnya memuat berbagai aturan sebenarnya sudah mengakomodir hal-hal yang diperlukan demi kemajuan Papua. Akan tetapi dalam penerapannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditentukan. Dana pembangunan puluhan triliun rupiah dalam skema Otonomi Khusus seakan tidak berdampak sama sekali dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Suryawan, 2017). Otsus sebenarnya merupakan antisipasi pemerintah dari permintaan merdeka rakyat Papua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa otsus merupakan muslihat yang dilakukan oleh Indonesia kepada Papua. “Otsus adalah contoh bahwa negara memberikan perhatiannya kepada Papua, sayang otsus yang sebenarnya bagus itu tidak dijalankan dengan baik” (wawancara 23 Januari 2018).

Pada Tahun 2003 pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003 untuk melakukan memberlakukan kembali UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Inpres tersebut menjadi awal mula pemekaran-pemekaran yang terjadi di Papua. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa pemekaran justru semakin membuat pelik permasalahan di Papua. Pemekaran menjadi persaingan elit-elit lokal untuk memperebutkan jabatan. Sehingga potensi keterpecahan antar rakyat Papua semakin besar. Selain itu pemekaran juga memerlukan anggaran yang besar sehingga anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan ke

pada sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan justru diserap oleh pemekaran.

Bagi rakyat Papua yang kritis dalam melihat gelagat pemerintah pemekaran justru membuat keinginan untuk merdeka semakin besar. Hal ini dikarenakan otsus dan pemekarang semakin mengkhianati rakyat Papua. Keidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia justru kian besar dengan adanya otsus dan pemekaran. Sisi laten dari nasionalisme Papua adalah pengalaman orang Papua di bawah pemerintah Indonesia- seperti banjir pendatang, marjinalisasi ekonomi, dan tindakan brutal oknum militer dan politik kepada rakyat Papua-semakin hadir di depan mata melalui kebijakan otsus dan pemekaran (Chauvel, 2005).

Beberapa hal di atas memeperlihatkan bahwa usaha-usaha pembangunan bangsa yang dilakukan Indonesia belum berhasil. Pemerintah Indonesia memang sudah melakukan usaha utamanya melalui otsus. Namun realisasi dari otsus dipandang belum maksimal oleh rakyat Papua. Inpres yang dikeluarkan pada tahun 2003 justru menjadi senjata makan tuan bagi Indonesia. Nasionalis Papua menganggap bahwa inpres tersebut merupakan sarana memecah belah rakyat Papua.

Bagi AMP KK Yogyakarta otsus sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan rakyat Papua akan tetapi seiring berjalannya waktu otsus seperti tidak dijalankan. Di dalam UU otsus AMP KK Yogyakarta melihat adanya upaya dari negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat Papua. Tidak efektifnya pelaksanaan otonomi khusus ini bagi AMP KK Yogyakarta membuat rakyat Papua tetap menderita. Beberapa hal yang tercantum di otsus

seperti mengangkat harga diri rakyat Papua, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, dan pelurusan sejarah tidak pernah dilakukan oleh negara. Seperti di katakan oleh Douw sebagai berikut “ Di dalam otsus sebenarnya sudah ada beberapa hal yang diupayakan misalkan mengangkat harga diri rakyat Papua, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya pelurusan sejarah. Cuma itu tidak berjalan sampai sekarang” (Wawancara 15 Januari 2018).

### 3. Kebutuhan Dasar Masyarakat Papua yang Tidak Terpenuhi

Tahap ketiga yang bisa dilakukan negara dalam pembangunan bangsa adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Fukuyama (2004) penguatan negara dilakukan apabila otoritas negara dalam bentuk yang stabil belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti perlindungan hak milik dan pendidikan dasar. Secara tidak langsung ini berkaitan dengan pembangunan bangsa tahap yang kedua dimana disini telah ada lembaga negara sebagai otoritas.

Negara dapat hadir di Papua dengan penguatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain memang kondisi di Papua yang masih dalam tahap membangun, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Sehingga setiap warga negara merasa negara hadir memberikan apa yang mereka butuhkan. Ketika negara memberikan kebutuhan dasar maka akan memunculkan rasa diperhatikan oleh negara. Rasa sebagai satu kesatuan bangsa akan hadir ketika negara berhasil menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Secara garis besar ada tiga kebutuhan dasar masyarakat. ketiga hal tersebut yaitu akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tiga kebutuhan itu

adalah cerminan dari keberlangsungan hidup manusia secara jasmani. Ketika kebutuhan secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi maka seseorang dapat dikatakan sejahtera. Sebenarnya ada satu faktor penting yang juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Yaitu kebutuhan akan kebebasan, tetapi melihat realitas di Papua saat ini kebebasan menjadi hal yang masih jauh. Sudah dipaparkan sebelumnya tindakan-tindakan represif dari pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis dari Papua. Tindakan kekerasan tersebut menunjukkan kebutuhan akan kebebasan masih terenggut oleh negara.

Pada bidang ekonomi bisa dilihat geliat pembangunan dan industrialisasi yang masuk ke tanah Papua. Kota-kota di Papua kini mulai banjir pembangunan dan menjelma menjadi kota-kota besar. Persaingan secara ekonomi hadir di kota-kota besar antara orang asli Papua dengan pendatang. Para pendatang atau transmigran memang cukup besar di Papua. Mereka umumnya berasal dari Maluku, Jawa, Kalimantan. Para transmigran mencoba mengadu nasib di Papua, selain juga karena kebijakan pemerintah pada saat orde baru untuk mengirim orang-orang ke Papua.

Persaingan antara pendatang dan orang asli Papua tidak bisa dihindarkan. Para pendatang yang memang sudah siap bersaing karena sedari awal datang ke Papua untuk mengadu nasib. Di kota-kota besar sektor ekonomi lebih dikuasai oleh pendatang dari pada orang asli Papua. Sektor-sektor informal di manokwari dikuasai sebagian besar oleh pendatang yang sebagian besar berasal dari Sulawesi, Jawa, Maluku, dan sebagian daerah lain (Suryawan, 2017). Geliat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lokal ini



berbahaya bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua. Orang asli Papua tersingkirkan dengan hadirnya arus pendatang ke Papua dan dikuasainya sektor-sektor ekonomi.

Lebih Jauh Douw mengatakan bahwa kebudayaan atau aktifitas ekonomi orang Papua kalau kita bilang masih komunal atau tradisional. mereka masih bergantung dengan alam, nah dengan masuknya industrialisasi itu sebenarnya kebudayaan Papua belum sampai kesana. “Dengan adanya kebudayaan baru yang masuk membuat kebudayaan lama bergesekan, lalu kebudayaan yang lama kalah. posisi kekalahan budaya ini membuat orang Papua semakin lama tersingkir” (Wawancara 15 Januari 2018). Hal ini mengakibatkan masyarakat Papua terasing di tanah moyangnya sendiri. Keberlangsungan hidup mereka dalam tanah pun mulai terongrong oleh cengkaman kuasa investasi global yang menerjang Papua dalam bentuk perkebunan sawit, ruko-ruko, perhutanan, mall-mall, hotel-hotel megah hingga masuknya pengusaha-pengusaha dan modal besar lainnya (Suryawan, 2017).

Di pegunungan penduduk mayoritas adalah orang asli Papua. Mereka umumnya mendiami tanah-tanah leluhur yang disakralkan. Tetapi lagi-lagi kondisinya semakin hari kian mengkhawatirkan. Arus industrialisasi dan pembangunan ala pemerintah merampah ke tanah-tanah yang berada di Pegunungan. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, tambang, dan sawah mengusik ruang hidup orang Papua yang tinggal di daerah pegunungan. I Ngurah Suryawan mengisahkan ketika dalam perjalanannya ke Kampung Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, ada seorang Bapak yang berkata ‘Orang Papua itu belum mampu kelola hidup. Hutan itu yang hidupi orang

Papua. Orang Papua tidak bisa kelola tanah yang tandus. Bagaimana *tong* (kita) mau kelola hutan kalau hutan *su* (sudah) dijual ke pengusaha (Suryawan, 2017).

Setiap suku di Papua memiliki ikatan batin dengan tanahnya yang dianggap sakral. Hal tersebut diabaikan di dalam eksploitasi tanah Papua oleh pemerintah. Gencarnya eksploitasi yang dilakukan membuat suku asli Papua tercerabut dari ruang hidupnya. Di Timika contohnya, eksploitasi kekayaan alam membuat suku asli seperti *pius* dari kamoro atau masyarakat suku asli lain seperti Amungme, Dani, Moni, Ndunga, Mee (Ekagi), dan Damal makin kehilangan tanah-tanah keramat “titipan leluhur” (KOMPAS, 2008).

Pada ranah kesehatan Papua juga masih belum mendapatkan jaminan yang maksimal dari negara. Baru-baru ini di awal tahun 2018 ditemukan sejumlah kasus campak yang berujung pada kematian anak-anak di daerah Asmat. Pendataan empat tim terpadu penanggulangan campak dan gizi buruk mencatat sejak September lalu terdapat 524 korban akibat wabah campak dan gizi buruk. Enam puluh tujuh anak telah meninggal akibat campak dan gizi buruk ini. Mereka berasal dari distrik Fayit, Aswi dan Pulau Tiga (VOA Indonesia, 2018). Peristiwa tersebut merupakan ironi di tanah Papua, menandakan bahwa rakyat Papua belum mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Bahkan jumlah penderita gizi buruk di Papua lebih mencengangkan. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, memperkirakan jumlah warga di Kabupaten Asmat yang menderita gizi buruk mencapai 15 ribu orang (VIVA, 2018).

Persoalan kesehatan mengemuka ditengah pembangunan infrastruktur yang sedang elu-elukan pemerintah. Pemerintah mengklaim dirinya telah membangun Papua melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Di Papua, pemerintah sekarang ini kata Rukka begitu massif melakukan pembangunan infrastruktur dan memomorduakan kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (VOA Indonesia, 2018). Rukha merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN konsen pada isu-isu tentang masyarakat adat.

Pelayanan kesehatan di Distrik-distrik yang berada di Papua tidak berjalan dengan baik. Seringkali pusat kesehatan di pedalaman kosong tidak ada pelayanan kesehatan. Fasilitas yang ada di pelayanan kesehatan juga kurang mendukung. Seperti peralatan kesehatan yang kurang lengkap dan obat-obatan yang tidak memadai. Di tambah sulitnya distribusi sarana penunjang pelayanan kesehatan karena akses menuju pedalaman masih sulit.

Satu lagi kebutuhan dasar yang wajib diberikan oleh negara adalah pendidikan. Pendidikan di Papua seperti jalan di tempat, jika tidak ingin mengatakan terjadi kemunduran. Belum ada usaha serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Ketersediaan guru, buku pelajaran, dan gedung sekolah masih minim khususnya di pedalaman-pedalaman Papua. Di beberapa tempat sudah terdapat gedung sekolah namun ketersediaan guru belum mencukupi. Ada dua persoalan mendasar mengenai pendidikan di Papua (Suryawan, 2017) : Pertama Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan di tanah Papua secara keseluruhan. Kendala utama yang biasanya menjaid alan

adalah kondisi geografis Papua. Meskipun sudah ada gedung sekolah yang dibangun, akan muncul persoalan selanjutnya yaitu ketersediaan guru. Ada sebuah candaan orang Papua atau biasa dikenal dengan *mop* yang bunyinya seperti ini “ Kitorang di sini butuh guru, bukan burung” (KOMPAS, 2008). Mop tersebut menggambarkan kondisi yang terjadi di Papua dimana guru sering kabur dari sekolah, sehingga murid-murid di pedalaman Papua tidak di beri pelajaran.

Suryawan menceritakan dengan cukup detail apa yang ia lihat di Kampung Wosimo, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat. “Sebuah SD Inpres Yukuyeda Ruang guru hanya terkunci dengan tali bambu dan kursi-kursipun sudah mulai lapuk. Yang lebih mencengangkan saya adalah sudah hampir 2 bulan ini 4 guru yang bertugas tidak kembali ke kampung untuk mengajar anak-anak Kampung Wosimo” (Suryawan, 2017). Kondisi tersebut menggambarkan memprihatinkannya pendidikan di Papua khususnya pedalaman. Bangunan sekolah yang sudah rusak dan di tambah tidak adanya guru kian memepersulit harapan akan pendidikan yang layak di Papua. Douw begitu menyayangkan realitas pendidikan Papua saat ini, dia mengatakan bahwa “disana Papua menghasilkan APBN yang banyak melalui kekayaan alam Papua tetapi pendidikan di Papua saja untuk memajukan budaya orang papua sendiri itu masih minim” (Douw, 2018). Menurut ketua AMP KK Yogyakarta tersebut, kekayaan alam Papua yang menghasilkan APBN besar tidak berdampak pada kemajuan pendidikan di tanah Papua.

Persoalan Pendidikan kedua di Papua adalah kebingungan untuk meletakkan fondasi pendidikan yang diterapkan di tanah Papua. Pendidikan

tidak melihat pada realitas yang terjadi di Papua. Akhirnya, pendidikan justru mencerabut anak-anak dari sejarah dan kebudayaannya. Douw menceritakan realitas pendidikan di Papua sebagai berikut

“kalau kita belajar dari sejarah yang diajarkan di Papua ya kita belajar tentang Indonesia bukan malah Papua. misalnya tanyakan kepada orang papua nama daerahnya artinya apa?, kalau di jawa kan punya arti. misalkan ke jayapura kemudian tanyakan arti jaya pura itu apa, mereka tidak tahu. karena kebanyakan sejarah yang diajarkan adalah sejarah Indonesia seperti borobudur, prambanan. tetapi yang disekitaran orang Papua justru orang Papua tidak tahu. Saya sendiri tahu sejarah justru dari jawa sini” (Douw, 2018).

Ketersediaan gedung sekolah memanglah penting tetapi metode pembelajaran tidak kalah penting. Pendidikan, tidak hanya di Papua seharusnya melihat pada konteks sejarah dan budaya setempat. Papua sebagai daerah yang dilanda bertubi-tubi perlakuan tidak adil oleh negara kiranya menjadi penting untuk menerapkan pendidikan yang membebaskan. Sehingga mereka tidak terhegemoni dengan pembangunan-pembangunan dan perlakuan semena-mena dari aparat. Karena pendidikan yang tidak mencoba membebaskan mereka berakibat penerimaan status quo.

Mama Esi yang hampir sepanjang hidupnya ia dedikasikan sebagai guru mengatakan bahwa di bawah Indonesia kondisi pendidikan justru semakin buruk. Jika boleh membandingkan, kualitas pendidikan zaman Belanda, menurut Mama Esi, jauh lebih bagus dibandingkan dengan pendidikan saat ini (KOMPAS, 2008). Dulu waktu zaman Belanda, guru benar-benar memberikan dedikasinya untuk mengajar. Guru lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikannya sebagai pendidik. Selain itu, metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi budaya setempat. Murid diajak untuk mengenali dirinya sendiri berdasarkan realitas di sekitar dan Papua pada umumnya.

Di Papua persoalan pendidikan masih berfokus pada ketersediaan infrastruktur, guru dan metode pembelajaran. Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan guru menjadi poin utama untuk memajukan pendidikan. Sayangnya, di Papua kedua hal tersebut masih belum diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan yang penting juga terkait dengan metode pembelajaran di Papua. Metode pembelajaran menjadi penting agar murid mengetahui jati diri dan memahami kondisinya. Sehingga berbicara pendidikan tidak hanya ihwal ketersediaan gedung dan guru, tetapi juga materi yang diberikan kepada para murid. Materi yang diberikan kepada murid adalah substansi dari pendidikan.

Disini telah dibahas perihal kebutuhan dasar meskipun masih cukup terbatas. Pembahasan dari ketiga aspek tersebut pun masih sangat singkat dan umum. Walaupun hanya melihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tetapi cukup memberi gambaran apakah negara sudah hadir untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat Papua. Pembangunan ekonomi dalam bentuk infrastruktur, investasi-investasi dan lain sebagainya seharusnya mempertimbangkan aspek lokal dari segi budaya dan sejarah. Ketika pembangunan yang dijalankan nir historis dan nir kebudayaan maka hasilnya adalah masyarakat yang tercabut dari ruang hidupnya. Mereka yang tercabut dari ruang hidup kemudian terasing dan harus melakukan adaptasi di tempat baru yang mungkin tidak sesuai dengan keahlian yang selama ini dimiliki. Mereka akhirnya akan menjadi kelompok yang termarginalkan di tempat ia lahir.

Demikian pula kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah. pembangunan infrastruktur jangan sampai menomorduakan adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan yang tidak memperhatikan kebudayaan dan sejarah di Papua lalu absennya jaminan kesehatan bagi masyarakat semakin memperburuk citra pemerintah di Rakyat Papua. Negara justru hadir dalam bentuk perampasan-perampasan ruang hidup, meminggirkan masyarakat, dan tidak memberi kebutuhan dasar berupa jaminan kesehatan.

Pendidikan adalah ujung tombak bagi negara untuk memperbaiki generasi di masa depan. Tetapi pendidikan di Papua justru berjalan di tempat. Gedung sekolah yang kosong, minimnya jumlah guru, guru yang tidak disiplin, kurangnya fasilitas penunjang pendidikan menjadi cerita hampir di setiap generasi. Belum ada upaya yang begitu serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pun demikian dengan metode pembelajaran yang tidak melihat pada konteks sejarah dan budaya setempat.

Pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dasar belum diberikan oleh negara. Ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar di rasa masih belum dirasakan oleh rakyat Papua. Menurut Kossay, putra asli Papua yang sudah malang-melintang di dunia perpolitikan dan banyak menulis buku tentang Papua menjelaskan kondisi di Papua sebagai berikut;

kualitas pendidikan masih di bawah standar karena sistem penyelenggaraan pendidikan hari ini masih terbatas dan belum memenuhi sesuai kebutuhan. Sedangkan dari kebutuhan kesehatan dalam hal fasilitas maupun tenaga media kesehatan masih banyak ditemui adanya kekurangan. Akibatnya, pelayanan kesehatan tidak optimal, dampaknya angka kematian cenderung masih tinggi. Dalam aspek ekonomi juga mengalami hal yang sama. Orang apapua masih merasakan adanya tekanan

marginalisasi yang begitu deras dihantui dalam persaingan kehidupan ekonomi (Kossay, 2015).

AMP KK Yogyakarta melihat tidak seimbangnya antara apa yang diberikan oleh Papua dan yang didapatkan oleh Papua. Papua bagi AMP KK Yogyakarta berkontribusi besar di dalam menghasilkan APBN melalui kekayaan alam Papua tetapi kebutuhan dasar masyarakat Papua hingga saat ini tidak terpenuhi.

## B. Konflik, Respon, dan Pembangunan Ekonomi

Apa yang terjadi di Papua merupakan konflik laten antara Papua dan Indonesia yang menyejarah. Disebut menyejarah disini adalah karena lamanya konflik tersebut. Konflik antara Papua dan Indonesia berlangsung sejak Papua belum masuk ke negara Indonesia sampai sekarang mereka telah masuk menjadi bagian dari Indonesia. Konflik tersebut selalu ada, langgeng dan diwariskan ke setiap generasi. Oleh karena itu dibagian ini akan di bahas mengenai bagaimana manajemen konflik yang dilakukan selama ini.

Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang sama langka di waktu yang sama (Wallensten, 2006). Konflik terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih di dalam waktu yang sama memperebutkan satu sumber daya. Sumber daya tersebut dianggap berharga atau langka sehingga menyebabkan kedua belah pihak sama-sama bersikukuh untuk mendapatkannya. Sumber daya bukan sekedar soal sumber ekonomi di alam, tetapi juga berkaitan dengan orientasi ekonomi, keamanan manusia, lingkungan, isu-isu sejarah dll (Wahyudi, 2016). Artinya bahwa sumber daya



tidak hanya terkait ekonomi dan alam. Akan tetapi terdapat isu-isu seputar sejarah, lingkungan, keamanan manusia dan lain sebagainya yang dianggap penting oleh kedua belah pihak atau lebih. Untuk melihat secara lebih dalam konflik yang terjadi di Papua maka akan di bahas terlebih dahulu sumber daya atau sumber konflik antara Papua dan Indonesia.

### 1. Sumber Konflik Papua

Papua dan Indonesia mengalami sebuah konflik yang berkepanjangan. Konflik terus terjadi di tanah Papua dan belum menunjukkan titik reda. Tentunya, konflik yang terjadi antara Papua dan Indonesia bukanlah tanpa sebab. Menurut teori konflik terdapat sumber daya yang diperebutkan oleh kedua belah pihak dalam waktu waktu yang sama. Sumber daya tersebut dikatakan sebagai sumber konflik. Hasil penelitian Tim Papua LIPI (2004) menjelaskan bahwa terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu sebagai berikut: sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; gagalnya pembangunan di Papua; dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otsus serta marginalisasi orang Papua (Widjoyo dkk, Papua Road Map, 2009). Untuk lebih jelas mengenai sumber konflik di Papua dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Persoalan, Konteks, dan Kontradiksi Narasi

Persoalan	Konteks	Narasi dominan (Nasionalis Indonesia)	Narasi tandingan (Nasionalis Papua)
Sejarah integrasi, status politik, dan identitas	Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia dan	- Teritori Papua bagian dari NKRI - Status politik	- Orang Papua bukan bagian dari Indonesia karena

poolitik	perang dingin	sudah melalui pepera dan resolusi PBB - Integrasi = pembebasan kolonialisasi Belanda	Melanesia - Pepera tidak sah karena tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Papua - Integrasi = Kolonisasi Indonesia
Kekerasan politik dan pelanggaran HAM	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme internasional	Kekerasan = cara untuk menjaga keutuhan NKRI	Kekerasan adalah pelanggaran HAM
Kegagalan pembangunan	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme Internasional	Pembangunan = upaya modernisasi orang Papua	Pembangunan = migrasi tenaga kerja dari luar Papua dan marjinalisasi orang Papua
Inkonsistensi kebijakan Otsus dan marjinalisasi orang Papua	Reformasi dan demokratisasi	Otsus = diletakkan dalam konteks integrasi nasional dan pembangunan	Otsus = pelurusan sejarah Papua, perlindungan Hak-hak orang Papua, pembangunan untuk orang Papua dan repapuanisasi

Sumber: Road Map Papua, LIPI (2009)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat sumber konflik yang ada di Papua. Tentunya tidak menutup kemungkinan adanya sumber konflik yang lain. Namun secara umum, empat faktor itulah yang menjadi sumber konflik di tanah Papua.

Sumber konflik yang pertama yaitu sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik. Sejarah integrasi Papua menjadi persoalan di dua belah pihak yaitu Indonesia dan Papua. Bagi nasionalis Indonesia, Papua merupakan bagian dari Indonesia dari sabang sampai merauke. Pepera yang dilakukan pada tahun

1969 menjadi legitimasi bahwa Papua sudah secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan nasionalis Papua berbeda pandangan, mereka menganggap yang dilakukan Indonesia adalah kolonialisme baru. Pepera yang dilakukan pada tahun 1969 tidak sah karena tidak menggunakan sistem *one man one vote*. Sehingga pepera tidak merepresentasikan suara keseluruhan rakyat Papua. Sementara itu menurut nasionalis Papua pada tanggal 1 Desember 1961 Papua sudah merdeka. Pada tanggal tersebut telah diproklamlirkan kemerdekaan Papua atas persetujuan Belanda.

Papua memiliki nasionalisme yang telah tumbuh di bawah kekausaan Belanda. ke-papuaan mulai dikonstruksi oleh Belanda melalui pendidikan saat itu. konsep kepapuan, kebersamaan dibangun oleh Belanda waktu itu. Setelah belanda membangun sekolah dengan pola-pola asrama kemudian membangun perasaan senasib. Lebih jauh McGibbon (2004) berpendapat bahwa berkembangnya nasionalisme Papua didorong oleh janji pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua. Janji akan diberikannya kemerdekaan, pendidikan yang di bangun, dan diizinkan nya deklarasi kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 oleh Belanda membuat identitas akan kebangsaan Papua terbentuk.

Kolonialisme Belanda di Papua telah menumbuhkan identitas kolektif rakyat Papua dan pemahaman akan sejarah Papua. Infiltrasi Indonesia kemudian diikuti integrasi Papua ke Indonesia di pandang nasionalis Papua sebagai rekayasa dan kolonialisme baru di tanah Papua. Kepapuaan merupakan identitas politik yang dibentuk pada masa kolonial dan dikonstruksi sebagai anti tesis dari keindonesiaan (Chauvel, 2005). Di lain sisi nasionalis Indonesia

menafikkan sejarah dan identitas kolektif rakyat Papua. Bagi nasionalis Indonesia hal-hal yang berbau kebudayaan Papua dianggap separatis.

Sumber konflik yang kedua adalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Kekerasan politik dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua hingga saat ini. Kekerasan Politik terbesar di Papua terjadi pada masa Orde Baru dimana negara seakan hadir di Papua melalui aparat militer. Sayangnya sampai sekarang pendekatan atas Papua masih menggunakan cara militeristik. Begitupun juga konstruksi nasionalisme yang didefinisikan secara militeristik. Sehingga kekerasan-demi kekerasan terus terjadi di Papua.

Suara kritikan dari Papua terhadap pemerintahan Indonesia dinggap melawan negara dan separatis. Karena kondisi yang tidak kunjung membaik dan kesewenang-wenangan terus terjadi di Papua, berbagai suara kritikan mengemuka. Namun kritikan dari Papua dianggap sebagai separatis. Implikasi dari nasionalisme yang didefinisikan secara militeristik membuat pendekatan kepada Papua menggunakan cara kekerasan dengan dalih keamanan. Kekerasan menjelang pepera, kemudian kekerasan untuk memantapkan posisi Indonesia di Papua, dan kekerasan yang mengiringi dengan dalih stabilitas pembangunan telah membetuk trauma yang mendalam bagi rakyat Papua.

Pengalaman orang Papua terhadap kekerasan politik ini menumbuhkan ingatan kolektif tentang penderitaan atau disebut dengan "*memoria passionis*" (Widjoyo dkk, Papua Road Map, 2009). Kekerasan yang dialami rakyat Papua terjadi berulang-ulang. Pengalaman akan kekerasan menumbuhkan ingatan yang sama dan traumatis. Pengalaman traumatis tersebut membuat rakyat Papua menganggap dirinya diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Sumber konflik yang ke tiga adalah kegagalan pembangunan. Pembangunan di Papua dilakukan secara top-down pada saat orde baru. Hal itu berdampak pada eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Papua. Orang Papua merasa bahwa kearifan lokal tidak diperhatikan dalam Pembangunan di Papua. Pemerintah hanya memanfaatkan Papua dari kekayaan alam tanpa memberdayakan masyarakat asli Papua. Terjadi perbedaan cara pandang pembangunan antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua. Wacana pembangunan ekonomi pada Orde Baru yang dimaknai negara sebagai usaha peningkatan kesejahteraan, dipandang oleh rakyat Papua sebagai upaya eksploitasi sumberdaya alam Papua dan marginalisasi rakyat Papua (Widjoyo dkk, 2009). Cerminan eksploitasi sumber daya alam Papua bisa dilihat dari penambangan-penambangan, pembukaan lahan untuk sawit, dan pembukaan lahan untuk persawahan. Pembangunan tersebut menyingkirkan masyarakat lokal khususnya masyarakat adat yang masih mempunyai keterikatan kuat dengan tanahnya. Selain itu, tambang, sawit, dan sawah bukan merupakan corak produksi dari orang asli Papua.

Pembangunan fisik memang tidak terbantahkan terjadi di permukaan sementara kualitas hidup dasar dalam perekonomian, kesejahteraan, dan pendidikan masih sangat memprihatikan (Suryawan, 2017). Pembangunan hanya diartikan secara simbolik berupa fisik dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang tidak partisipatif dan memberdayakan berdampak pada pengabaian pada kebutuhan dasar. Hal ini terjadi di Papua dimana jaminan kebutuhan dasar seperti akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan belum dirasakan. Permasalahan kebutuhan dasar masih menjadi

persoalan yang cukup krusial di Papua yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Pembangunan di Papua juga menjadikan rakyat Papua sebagai penonton. Pembangunan yang digagas pemerintah salah satunya dengan melakukan transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua. Para pendatang justru menguasai sektor-sektor ekonomi di Papua. Terdapat konflik di dalam aspek akses ekonomi antara pendatang dan orang asli Papua. Ironisnya pendatang justru menjadi pihak yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari pembangunan di Papua.

Sumber konflik yang terakhir adalah marginalisasi kepada orang asli Papua. Marginalisasi adalah situasi yang dialami oleh kelompok subordinat sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang bersifat asimetris dengan kelompok dominan, namun masih terdapat ruang bagi kelompok subordinat ini untuk bertahan (Widjono dkk, Papua Road Map, 2009). Marginalisasi terhadap orang Papua dapat dilihat dari beberapa sektor yaitu demografi, sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik. Dalam aspek-aspek tersebut rakyat Papua berada dalam posisi subordinat.

Dari segi demografi jumlah orang asli Papua kian mengalami penurunan karena gelombang transmigrasi. Pada sensus 2010, jumlah penduduk asli Papua sekitar 73,57 persen (2.121.436 jiwa), sementara jumlah pendatang 22,84 persen (658.708 jiwa). Lima kabupaten dengan mayoritas non-Papua adalah Merauke (62,73%), Nabire (52,46%), Mimika (57,49%), Keerom (58,68%), dan Kota Jayapura (65,09%). Ke-23 kabupaten lain di Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh orang asli Papua (Tirto id, 2017). Data

tersebut menunjukkan dimana pergerseran jumlah penduduk asli Papua kian terlihat. Khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat perekonomian tapi malah didominasi oleh para pendatang.

Sementara itu dari segi sosial budaya, ekspresi budaya asli Papua dianggap sebagai praktik separatisme. Tentunya masih segar diingatan pembunuhan kepada budayawan Papua Arnold Ap. Arnold Ap pada tahun 1980an mencoba menghidupkan kembali budaya asli Papua melalui lagu-lagu tradisional Papua. Apa yang dilakukan Arnold Ap dianggap sebagai upaya untuk melawan kekuasaan Indonesia yang membuat dirinya di bunuh. Bintang kejora yang menjadi simbol kebudayaan Papua juga di stigma sebagai simbol separatisme. Kelahiran PP No 77/2008 tentang pelarangan penggunaan simbol-simbol budaya tertentu menjadi penanda utama kecurigaan pemerintah pusat terhadap ekspresi budaya Papua (Widjoyo dkk, 2009).

Marjinalisasi pada ranah politik bisa dilihat dari wacana politik yang dominan bahwa Papua bagian dari Indonesia. Wacana sejarah Papua dimonopoli Indonesia bahwa Indonesia telah menyelamatkan Papua dari kolonialisme Belanda dan melalui pepera rakyat Papua telah resmi menjadi bagian dari Indonesia. Realita yang terjadi dimana kekerasan-kekerasan dialami oleh rakyat Papua menjelang pepera dan sepanjang kependudukan Indonesia di Papua tidak dimunculkan. Indonesia mengkonstruksikan wacana bahwa kritikan narasi sejarah dan pembangunan dari Papua adalah kelompok separatis yang wajib untuk dimusnahkan. Indonesia kerap menggunakan istilah OPM dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada gerakan-gerakan perlawanan dari Papua.

Pada masa Orde Baru marjinalisasi di ranah politik lebih jelas terlihat dimana jabatan politik di Papua mayoritas di kuasai pendatang. Hanya terdapat tiga gubernur yang merupakan orang asli Papua yakni Izaak Hindom, Barnabas Suaebu, dan Freddy Numberi (Widjoyo dkk, 2009). Selain itu, Gubernur Papua berasal dari kalangan pendatang dan militer. Demikian pula dalam posisi DPRD yang banyak dihuni oleh kalangan pendatang. Setelah reformasi, rakyat Papua menuntut menuntut hak-hak mereka yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru.

## 2. Aktor-Aktor utama yang berkonflik

Konflik yang terjadi di Papua melibatkan beberapa pelaku utama yang mempunyai kepentingan. Pelaku-pelaku tersebut memperebutkan sumber daya yang langka. Sumber daya utamanya adalah terkait Papua dimana didalamnya ada persoalan ekonomi, HAM, kebebasan dan lain-lain. Masing-masing pelaku berhadapan dengan kepentingan-kepentingannya dan kemerdekaan Papua sebagai poin utama.

Hasil penelitian LIPI (2004) menunjukkan bahwa mereka terdiri atas kelompok-kelompok pro kemerdekaan, kelompok-kelompok pro NKRI, dan kelompok-kelompok tengah. Kelompok pro kemerdekaan terdiri dari OPM, TPN (Tentara Pembebasan Nasional), DEMMAK (Dewan Masyarakat Musyawarah Koteka), PDP (Presidium Dewan Papua), Panel Papua, Satuan Tugas Papua, Dewan Revolusioner OPM, Kelompok-kinternasional pro-kemerdekaan (Elizabeth dkk, 2004). Kelompok pro NKRI terdiri atas TNI (Komando Daerah Militer, Komando Pasukan Khusus, Komando Strategis



Angkatan Darat), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Barisan Merah Putih, Milisi Laskar Jihad, dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) (Elizabeth dkk, 2004). Sedangkan kelompok tengah terdiri atas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi-organisas sosial antara lain sebagai berikut: ALDP (Aliansi Demokrasi Untuk Papua), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), YALI (Yayasan Lingkungan), Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Kekerasan (Kontras), SPP (Solidaritas Perempuan Papua, DAP (Dewan Adat Papua), Kepala-kepala suku, Gereja katolik, Gereja Protestan, Media Massa, dan Mahasiswa (Elizabeth dkk, 2004)

Tentunya peta politik aktor-aktor utama yang berkonflik dapat berubah setiap waktu. Perubahan sikap disebabkan karena pembacaan permasalahan yang bisa berubah karena realitas berjalan dengan dialektis. Konflik yang terus berlanjut memungkinkan perubahan sikap dari masing-masing kelompok. Namun LIPI (2009) menyederhanakan aktor-aktor utama konflik menjadi Pemerintah Pusat, TNI, Polri, OPM, PDP (Presidium Dewan Papua), DAP (Dewan Adat Papua), Gereja-gereja dan lembaga keagamaan, LSM, Ormas, dan Kelompok suku-suku di Papua. Gambaran para aktor mengenai sikap dan kepentingannya dapat dilihat pada tabel 2.

Aktor Konflik Papua	Wacana	Kepentingan	Sumber Konflik
Depdagri/BIN, TNI/Polri, Menkopolkam, pemda/DPRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasionalisme Indonesia dan keutuhan NKRI</li> <li>- Otonomi Khusus Papua dan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol terhadap sumberdaya-sumberdaya di Papua</li> <li>- Repapuanisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik</li> <li>- kegagalan pembangunan dan inkonsistensi</li> </ul>

			otsus
Organisasi Papua Merdeka	Nasionalisme Papua	Kemerdekaan Papua	Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik
Presidium Dewan Papua	Status Politik Papua, Pengakuan terhadap Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961	Kemerdekaan Papua	- Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik - Kekerasan politik dan pelanggaran HAM
Dewan Adat Papua	Perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua, pelurusan sejarah, identitas Papua	Pemerintah adat Papua	- Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik - Kegagalan pembangunan
Gereja	Papua sebagai zona damai	Perdamaian di tanah Papua	Kekerasan politik dan pelanggaran HAM
LSM	HAM, gender, dan good governance	Demokratisasi di tanah Papua	- Kekerasan politik dan pelanggaran HAM - Inkonsistensi otsus - Kegagalan pembangunan
Ketua-Ketua Suku	Pemberdayaan masyarakat adat dan kesejahteraan	Perlindungan suku-suku di Papua	Kegagalan Pembangunan

Sumber: Penelitian LIPI 2009 (Road Map Papua)

Dari tabel 2 bisa diketahui bahwa secara garis besar terdapat delapan kelompok utama di dalam konflik Papua. Delapan kelompok tersebut memiliki kepentingan masing-masing terhadap konflik di Papua. Dari wacana-wacana yang digulirkan oleh delapan kelompok tersebut kemudian menjadi konsumsi publik masyarakat secara luas. Sikap dan keberpihakan masyarakat secara luas

khususnya di Papua tidak terlepas dari aktifitas 8kelompok utama yang berkonflik. Demikian pula delapan kelompok utama, mereka mewacanakan apa yang terjadi di dalam masyarakat Papua.

Pemerintah pusat yang diwakili oleh Depdagri/BIN< Tni/Polri, Menkopolkukam, dan Pemda/DPRP memiliki kepentingan untuk mempertahankan Papua di bawah kekuasaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia di tekankan pada setiap aktifitas yang dilakukan pemerintah di Papua. Praktik-praktik aktor ini antara lain adalah menyusun perangkat aturan perundang-undangan untuk Provinsi Papua, mengerahkan operasi militer dan keamanan di Papua, dan menyelenggarakan administrasi demokrasi (Widjoyo dkk, 2009). Sumberdaya alam yang melimpah di Papua membuat pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk menguasai. Pemerintah pusat menjadi aktor utama serangkaian kekerasan yang terjadi di Papua. Pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab dari negara melalui pemerintah pusat. Sejarah Papua, ekspresi kebudayaa, dan kebebasan dimonopoli oleh pemerintah pusat dengan bentuk-bentuk kontrol yang cukup ketat.

OPM memiliki kepentingan untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan infiltrasi Inndonesia ke Papua kemudian membentuk perlawanan secara militer melalui OPM. Perlawanan OPM didasarkan pada Kehadiran Indonesia yang menggagalkan kemerdekaan Papua dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui militer. OPM mengkampanyekan nasionalisme Papua bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Papua merupakan bangsa sendiri yang sudah berdaulat sejak 1 Desember 1961. Aksi-aksi gerilya dan serangan militer menjadi gaya

perlawanan OPM atas Indonesia. Sebagaimana diketahui bagi sebagian rakyat Papua representasi Indonesia di Papua adalah militer.

Presidium Dewan Papua merupakan kelompok pro kemerdekaan Papua yang dianggap lebih moderat. PDP dibentuk melalui kongres rakyat Papua yang kedua pada tahun 2000 di Jayapura. Sebagai lembaga masyarakat Papua di tingkat provinsi, PDP merupakan satu-satunya lembaga yang secara informal memiliki legitimasi politik, sosial, dan budaya secara luas dari masyarakat Papua (Widjono dkk, 2009). PDP memperjuangkan kemerdekaan Papua dan menginginkan pelurusan sejarah bahwa Papua telah merdeka pada 1 Desember 1961. Selain itu pelanggaran kekerasan politik dan pelanggaran HAM juga menjadi fokus dari PDP.

Kelompok yang lebih fokus pada dalam ranah sosial budaya adalah DAP. DAP memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan mempertahankan tanah-tanah adat. kerusakan hutan, perampasan tanah adat, eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam Papua membuat awal DAP dibentuk dan bergerak. DAP menjadi pelopor dalam demonstrasi pengembalian otsua pada 12 Agustus 2005 dan menjadi panitia hari bangsa pribumi pada 6 Agustus 2006 yang diwarnai pengibaraan bendera bintang kejora (Widjono dkk, 2009).

Gereja dan lembaga keagamaan adalah pihak yang fokus menyuarakan perdamaian di Papua. Mereka mencoba menegakkan HAM dan menolak pelanggaran terhadap HAM. Pengalaman kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua membuat gereja dan lembaga keamanan bergerak untuk mengkampanyekan perdamaian. LSM-LSM juga tidak berbeda

jauh dengan gereja dan lembaga keagamaan, mereka fokus pada advokasi kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Kepala suku memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Papua yang terikat dengan suku-suku. Suara kepala suku menentukan suara masyarakat yang dipimpinnya. Para kepala suku mempermasalahkan eksploitasi sumberdaya alam yang ada di Papua, perusakan hutan dan penyingkiran terhadap kearifan lokal. Setiap suku memiliki sikap yang berbeda terkait hubungan antara Indonesia dan Papua. Kelompok suku yang dominann di Papua yaitu: Biak, Amungme (Timika), Serui (Yapen Waropen), Dani (Wamena), Sentani (Jayapura), Marind (Merauke), Me (Paniai), Moni (Paniai), Asmat (Agats), Ayamaru (Sorong), dan Kamoro (Timika) (Widjoyo dkk, 2009).

Kelompok yang perannya tidak bisa dikesampingkan dalam konflik Papua adalah mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua sebagai kelompok terdidik tentunya memiliki pembacaan tersendiri terhadap konflik di Papua. Secara umum mahasiswa berada pada posisi tengah, sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian LIPI (2004) yang masih dalam posisi mengambang. Hal ini tentunya wajar dimana terdapat fragmentasi di tubuh mahasiswa Papua terkait kemerdekaan Papua. Tetapi terdapat kelompok mahasiswa yang konsisten memprjuangkan kemerdekaan Papua. Kelompok mahasiswa tersebut adalah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Tujuan dari gerakan AMP adalah mencapai sebuah pengakuan hak menentukan nasib sendiri atau *Right to Self Determination* bagi Bangsa Papua yang teranipulasi dari berbagai aspek oleh bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-

hak ulayat Masyarakat Adat (MADAT) di West Papua (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013).

### 3. Konflik di Papua dan Upaya Penyelesaian

Manajemen konflik adalah usaha untuk mengatur konflik agar tercapai sebuah resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengontrol konflik agar tidak terjadi kekacauan dan kekerasan. Sebagaimana dikatakan oleh (Wahyudi, 2016) manajemen konflik tidak hanya dipahami sebagai upaya mengenali konflik dan menganalisa agar konflik dapat dikontrol tetapi juga dipahami sebagai gagasan, teori dan metode untuk memahami, konflik, dan praktik konflik untuk mengurangi potensi kekerasan dan meningkatkan harmonisasi dalam periode politik. Lebih jauh Manajemen konflik menunjukkan bagaimana suatu tim berusaha menyelesaikan konflik yang dihadapi (wibisono, 2005). Dari beberapa pengertian yang dikemukakan maka dapat dipahami bahwa manajemen konflik adalah upaya untuk mengontrol suatu konflik agar tidak terjadi kekerasan ataupun kekacauan dan dilakukan dalam upaya kerjasama untuk menyelesaikan konflik.

Terdapat beberapa strategi dalam manajemen konflik. Menurut Fink, (2002) terdapat lima strategi di dalam manajemen konflik yaitu: Pertama *Interagting style*, strategi ini ditandai dengan kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling berkomunikasi secara terbuka, untuk menyelesaikan permasalahan. Kedua *Obliging Style*, strategi ini menekankan menjaga hubungan dengan orang lain dari pada memaksakan kepentingan sendiri. Ketiga *Dominating style*, strategi ini mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan

orang lain. Biasanya ditandai dengan upaya yang intimidatif, ejekan, dan berfokus untuk mengalahkan lawan. Keempat yaitu *avoiding style*, strategi ini upaya untuk menghindari masalah atau membiarkan masalah. Kelima, *Compromising style* yaitu pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk mengejar yang bisa diterima secara bersama atau *win win solution*.

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki legitimasi secara hukum merupakan pihak yang seharusnya lebih aktif dalam manajemen konflik yang terjadi di Papua. Konflik di Papua secara umum terjadi antara masyarakat dan negara. Sehingga negara yang memiliki lembaga dan perangkat pendukung sangat bisa untuk melakukan manajemen konflik bahkan upaya untuk menyelesaikan konflik. Namun, manajemen konflik sendiri memiliki berbagai strategi. Jenis manajemen konflik yang dipilih akan menentukan berjalannya konflik kedepan. Dalam konteks konflik Indonesia dan Papua bisa dilihat manajemen konflik yang berebeda di setiap periode pemerintahan.

Pada saat Orde Baru negara hadir di Papua melalui kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh militer. Suara-suara kritis dari Papua diredam dengan menggunakan cara militeristik. Tidak ada jalan yang dilakukan secara damai dalam menangani konflik di Papua. Pelanggaran HAM sangat banyak terjadi di Papua kala Orde Baru. Hal ini mencerminkan manajemen konflik yang dilakukan negara dengan strategi *Dominating style*. Strategi ini mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Dalam arti negara mementingkan kepentingannya untuk menduduki Papua tanpa mendengar aspirasi rakyat Papua yang ingin memisahkan diri.

Strategi dengan gaya mendominasi ini ditandai dengan upaya-upaya intimidatif, ejekan, dan berfokus mengalahkan lawan. Dalam konteks Papua saat Orde Baru, negara merepresi gerakan-gerakan yang dianggap membahayakan kedudukan Indonesia di Papua. Orang Papua yang kritis di stigma sebagai separatis. Orang Papua dianggap masih primitif sehingga hanya dijadikan objek pembangunan. Tidak ada ruang partisipasi yang menimbulkan pembangunan justru tidak dinikmati oleh orang asli Papua melainkan pendatang.

Papua berada di dalam posisi subordinat dimana negara menjadi pihak yang mendominasi dalam setiap wacana mengenai Papua. Negara menganggap bahwa bergabungnya Papua menjadi konsekuensi logis. Tidak pernah diajarkan bagaimana proses masuknya Papua ke dalam Indonesia. Proses tersebut melalui serangkaian perundingan yang tidak melibatkan orang asli Papua. Lagi-lagi orang asli Papua hanya dijadikan objek. Setiap kelompok dari Papua yang menyuarakan kemerdekaan dan pelanggaran HAM distigma separatis. Jika kelompok pro kemerdekaan menggunakan cara fisik seperti milliter, mereka distigma sebagai Kelompok Krimminal Bersenjata (KKB).

Setelah orde baru runtuh, sempat dilakukan dialog antara pemerintah dan perwakilan rakyat Papua. Dialog ini dilakukan di tahun 1999 pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Dialog pada tanggal 26 Februari 1999 pemerintah RI membuat kegiatan yang disebut Dialog Nasional, yakni pertemuan massal antara Presiden RI dan 21 menterinya, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Papua (Gubernur Papua, Pangdam Trikora, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Komandan Pangkalan TNI-AL) dengan 100 tokoh masyarakat Papua (75 orang berdomisili di Papua,



sedanagkan 25 orang berdomisili di luar Papua) (Widjoyo dkk, Papua Road Map, 2009). Saat itu tim 100 yang mewakili rakyat Papua menginginkan untuk merdeka. Dalam acara tersebut , Tim Seratus yang dipimpin Tom Beanal , menyatakan bahwa “ Bangsa Papua berkehendak keluar dari NKRI untuk merdeka dan berdaulat penuh” (Alua A. A., 2002).

Keinginan untuk merdeka tersebut tidak disangka oleh pihak pemerintah waktu itu. Menanggapi pernyataan tersebut, Habibie tidak secara tegas menolak ataupun menerima, menghimbau masyarakat Papua untuk merenungkan situasi dan pernyataan politik tersebut (Alua A. A., 2002). Presiden Habibie pada saat itu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Namun setelah dialog tersebut dilaksanakan, pemerintah tidak melakukan tindakan lanjutan untuk mendiskusikan bersama tawaran dari rakyat Papua. Pemerintah justru mensahkan UU No. 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat, pemekaran Kabupaten paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kota Sorong. Undang-undang tersebut dikeluarkan tujuh bulan setelah Dialog Nasional tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1999. Kebijakan ini bagi Tim Seratus, menunjukkan bahwa pemerintah telah menolak melanjutkan dialog dan meneruskan strategi pemerintah kolonial yakni pecah dan belah (*divide at impera*) (Widjoyo dkk, 2009).

Setelah Dialog Nasional bersama Tim Seratus belum ada lagi dialog nasional lanjutan yang membahas mengenai Papua. Pemerintah membiarkan konflik terus terjadi di Papua tanpa adanya usaha untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Kekerasan demi kekerasan masih kerap terjadi di Papua hingga saat ini. Pemerintah mencoba untuk meredam aspirasi untuk

merdeka dari rakyat Papua melalui pembangunan ekonomi. Akan tetapi pembangunan ekonomi tidak tepat sasaran kepada rakyat Papua, yang merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi Indonesia di Papua justru para pendatang. Sampai saat ini orang asli Papua masih bergelut dengan persoalan jaminan kebutuhan dasar seperti akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, rakyat Papua merasa bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi oleh negara, tapi itu hanya dilakukann pada saat Pemerintahan Gus Dur. Saat Gus Dur menjadi presiden , rakyat Papua diizinkan mengibarkan Bendera Fajar. Bahkan Gur Dur mengabulkan permintaan masyarakat setempat untuk menggunakan kata Papua menggantikan Irian Jaya (Firman, 2016). Filep Karma, salah satu pemimpin pelopor kemerdekaan Papua saat ini yang masih bertahan menyatakan “Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang” (Sumandoyo, 2016). Menurutnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya. Tidak ada, ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara tetapi itu langsung dibungkam, jadi seperti aksi demo itu langsung dilokalsir, tidak boleh bergerak (Sumandoyo, 2016). Artinya tidak ada usaha dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Pemeritah terkesan membiarkan tetapi tetap melakukan pembungkaman dan represifitas terhadap gerakan perlawanan dari Papua.

AMP KK Yogyakarta mengungkapkan bahwa tidak ada manajemen konflik yang baik dilakukan oleh Indonesia. Bahkan mereka cenderung pesimistis dengan cara-cara yang dilakukan Indonesia dalam menangani konflik yang terjadi di Papua. Abbi Douw selaku ketua AMP KK Yogyakarta mengatakan “Kalau dalam misalkan penanganan konflik saya pikir Indonesia tidak pernah serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua” (Douw, 2018). Pembiaran konflik yang terus terjadi di Papua membuat mahasiswa khususnya AMP kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam penyelesaian kasus kekerasan misalnya, Abbi mengatakan “Misalkan yang ramai saat ini kasus Paniai berdarah kemarin, itu kan sampai sekarang bahkan sebelum-sebelumnya sampai sekarang masih belum ditangani. Misalkan kasus biak berdarah masih mengambang. Jadi tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut” (Wawancara, 15 Januari 2018).

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah tidak berasal dari AMP saja tetapi juga mahasiswa Papua yang lain. Cara pemerintah dalam menangani persoalan yang ada di Papua dianggap cukup rumit. “Rumit ketika membicarakan bagaimana pemerintah Indonesia menangani permasalahan di Papua” (wawancara 23 Januari 2018). Menurut Pical, pemerintah tidak melakukan manajemen konflik dengan baik sehingga kekerasan terus terjadi. Selain itu, menurutnya konflik kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. “Saya kira tidak ada manajemen konflik yang baik sehingga berbagai persoalan terus terjadi secara terus-menerus. Ada elit-elit yang merasakan manfaat secara pribadi dari adanya konflik yang terjadi di Papua, sehingga berbagai permasalahan dibiarkan begitu saja” (wawancara 23 Januari 2018).

LIPI (2009) dalam buku Road Map Papua; Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future (Widjoyo dkk, 2009), mengeluarkan rekomendasi yang cukup baik yaitu memulai kembali dialog yang selama ini terhenti. Setelah Dialog Nasional pada tahun 1999 belum ada dialog lagi yang dilakukan oleh pemerintah dengan rakyat Papua mengenai konflik yang terjadi selama ini. Namun saran-saran yang dikeluarkan oleh LIPI tidak dihiraukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak merespon secara positif dan akhirnya persoalan di Papua terus terjadi tanpa adanya upaya penyelesaian secara terbuka antara pemerintah dan rakyat Papua. Pemerintah sebagai perwakilan negara seharusnya mempunyai itikad baik dan memprakarsai adanya dialog untuk menyelesaikan konflik.

Di lain sisi, kegagalan dialog pada tahun 1999 membuat Mahasiswa Papua yang tergabung di dalam AMP KK Yogyakarta tidak terlalu merespon baik apabila ada upaya dialog lanjutan. Permintaan kemerdekaan bangsa Papua pada dialog yang dilakukan tahun 1999 hanya ditanggapi dengan dingin oleh pemerintah. AMP menganggap dialog tidak membuahkan hasil yang positif bagi rakyat Papua. Dialog hanya akan menghasilkan kompromi dalam bentuk *win-win solution* yang akan mempertahankan kolonialisme Indonesia atas Papua. Bagi AMP dialog tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Seperti yang dikatakan oleh Douw “bagi kami dialog tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena disana akan ada kesimpulan *win-win solution*. Jadi dialog sendiri sudah pernah berjalan tahun 1999 dan hasilnya tidak menguntungkan orang Papua sampai sekarang” (Wawancara 15 Januari 2018). AMP KK Yogyakarta menghendaki langsung dilakukan referendum

untuk Papua menentukan nasib sendiri. Salah satu hal yang membedakan antara AMP KK Yogyakarta dengan mahasiswa Papua yang tidak tergabung di dalam AMP adalah penentuan sikap mengenai masa depan Papua. AMP KK Yogyakarta mengusahakan untuk diberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang berarti referendum kemerdekaan. Sedangkan mahasiswa Papua lain yang tidak tergabung di dalam AMP sebenarnya memiliki kesadaran terhadap persoalan yang terjadi di Papua tetapi masing-masing memiliki cara pandang yang berlainan. Mahasiswa Papua secara umum memiliki posisi sikap di tengah-tengah atau abu-abu di dalam konflik yang terjadi di Papua seperti yang diklasifikasikan dalam penelitian LIPI tahun 2004.

Menurut LIPI (2009) usaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua harus dilakukan. Jika tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk duduk bersama maka konflik akan terus terjadi dan rakyat Papua yang menjadi korban. Usaha-usaha untuk mendorong pemerintah melakukan dialog dengan Papua sudah dilakukan oleh elit Papua tapi pemerintah tidak menindaklanjuti. Giay Salah seorang Paitua yang cukup dihormati di Papua mengatakan “ Kita terus meminta untuk duduk berbicara tapi, ya sudah. Yang jelas, media sosial ada sekarang. Kami orang Papua juga banyak masalah, karena kami bukan malaikat, Indonesia juga banyak masalah, kami bukan suci dan kami harus koreksi diri. Kami sudah lama meminta dialog untuk berbicara (sumandoyo, 2017).

Konflik yang terjadi di Papua apabila merujuk pada teori Wirawan (2010) tentang jenis konflik maka tergolong pada jenis konflik politik. Konflik politik karena terdapat dua kepentingan antara Pemerintah yang ingin

mempertahankan kedudukannya di Papua dan kelompok-kelompok masyarakat Papua salah satunya AMP yang mempertanyakan status politik Papua. AMP KK Yogyakarta memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga terdapat dua kepentingan yang berbeda antara Pemerintah dan AMP KK Yogyakarta. Masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya sehingga konflik terjadi.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini biasa disebut dengan resolusi konflik. LIPI pada tahun 2009 telah mengeluarkan suatu rekomendasi resolusi konflik untuk Papua. Upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan menurut LIPI yaitu dengan memulai dialog antara pemerintah dan rakyat Papua. Sekian lama tidak ada dialog antara pemerintah dan rakyat Papua pasca dialog pada tahun 1999 yang tidak menghasilkan keputusan yang efektif. Dialog untuk menciptakan rekonsiliasi harus dilakukan dengan kerendah-hatian dari kedua belah pihak. Menurut Malik (2017) salah satu upaya resolusi konflik adalah dengan cara dialog yaitu negosiasi antara dua belah pihak yang bermasalah. Jalan negosiasi dilakukan supaya masing-masing pihak yaitu pemerintah dan rakyat Papua dapat menjelaskan pandangannya.

#### C. Nasionalisme Papua dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta

Nasionalisme adalah bangsa yang dibayangkan oleh suatu komunitas politik dimana ikatan persaudaraan dan kesamaan akan suatu hal yang dirasakan ada didalamnya. Semua proses menjadi bangsa itu melewati

rangkaian peristiwa yang real oleh setiap anggotanya. Dengan kata lain nasionalisme adalah komunitas politik yang mempunyai rasa yang sama dan rasa tersebut dibentuk setelah melewati peristiwa yang nyata kemudian ditafsirkan secara bersama.

Definisi lain dari nasionalisme adalah bangsa dibayangkan sebagai komunitas, sebab tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar (Anderson, 2008). Artinya ada kesetiakawanan di dalam bangsa yang dibayangkan oleh komunitas politik.

Nasionalisme yang muncul dari negara-negara koloni biasanya hadir karena rasa ketertindasan yang dirasakan. Ketertindasan tersebut memunculkan rasa kesetiakawanan oleh sekelompok orang atau komunitas politik kelas dua. Bangsa penjajah kerap memandang lebih rendah kepada bangsa yang dijajah. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut nasionalisme muncul dari bangsa koloni.

Dahulu nasionalisme disebut sebagai pandangan yang sempit karena menganggap bangsanya lebih superior dibanding bangsa lain. Nasionalisme yang demikian bisa terjebak ke dalam penindasan terhadap bangsa lain. Namun sekarang nasionalisme bertransformasi dimana demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan, dan seterusnya, merupakan dimensi-dimensi *inherent* dalam gagasan besar bagi nasionalisme dan negara bangsa (Lay, 2006).

Apabila melihat nasionalisme Indonesia dan Filipina sebagai bangsa yang sedang di jajah waktu itu, maka terlihat jelas penggagas nasionalisme adalah

kelompok-kelompok terdidik. Di Indonesia hadirnya organisasi Boedi Oetomo disebut sebagai munculnya nasionalisme. Sumpah pemuda yang di pelopori oleh kaum-kaum muda terdidik yang mendeklarasikan dirinya sebagai satu bangsa tanpa perbedaan adalah bukti dimana pemuda memiliki peranan penting dalam nasionalisme. Soekarno sang proklamator NKRI merupakan anak muda terdidik yang lantang dalam menyuarkan nasionalisme. Di Filipina ada Jose Rizal seorang anak muda terdidik yang melawan kolonialisme Spanyol di Filipina. Jose Rizal adalah penggagas awal nasionalisme Filipina.

Kaum muda terdidik selalu memiliki tempat tersendiri di dalam penyebaran nasionalisme. Pada konteks Papua terdapat organisasi mahasiswa yang lantang menyuarkan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Organisasi yang konsisten menyuarkan kemerdekaan bagi bangsa Papua adalah AMP. AMP memiliki beberapa komite di kota-kota besar, salah satunya adalah di Yogyakarta. Disini akan membahas bagaimana konstruksi nasionalisme oleh AMP KK Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa nasionalisme Papua ada semenjak Papua belum tergabung kedalam Indonesia. Infiltrasi Indonesia ke Papua mendapat perlawanan dari nasionalis Papua yang menghendaki Papua sebagai negara bangsa yang berdaulat dan terlepas dari Indonesia. Kini nasionalisme Papua masih terus ada dan menjadi antitesis dari nasionalisme Indonesia di Papua. Konflik yang terjadi selama ini antara Indonesia dan Papua salah satunya disebabkan karena adanya nasionalisme Papua yang sudah tumbuh di benak rakyat Papua.



Manurut Smith (1981) nasionalisme pada kakekatnya memiliki tiga unsur penting yang membentuknya, yakni kesadaran identitas bersama, terbentuknya ideologi tentang sejarah bersama dan memiliki rasa senasib sepenanggungan bersama yang berlandaskan gerakan sosial bersama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Disini teori dari Smith akan digunakan untuk melihat bagaimana konstruksi nasionalisme Papua dari AMP KK Yogyakarta.

#### 1. Identitas bersama yang dibentuk oleh AMP KK Yogyakarta

AMP KK Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. momentum kejatuhan Soeharto yang diiringi dengan demokratisasi di Indonesia dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa Papua untuk membentuk suatu organisasi yang konsisten menyoroiti permasalahan-permasalahan di Papua. AMP KK Yogyakarta merupakan bagian dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh AMP secara keseluruhan.

AMP KK Yogyakarta kerap melakukan aksi-aksi untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Tanggal 1 Desember biasanya mereka melakukan aksi memperingati hari kemerdekaan Papua. Pada tanggal 1 Desember 1961 Kemerdekaan Papua dideklarasikan dengan izin dari Belanda. Tahun 2016 sempat terjadi insiden pengepungan asrama Papua Kamasan di Yogyakarta. Pengepungan dilakukan oleh sekelompok ormas yang menuding bahwa mahasiswa Papua akan melkakukan aksi separatis. Pada saat itu AMP dan beberapa organisasi lain hendak melakukan aksi menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

AMP KK Yogyakarta melihat bahwa identitas kepapuaan dibentuk oleh Belanda. Paham nasionalisme Papua dibentuk oleh Belanda yang membangun sekolah-sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Douw “Sebelum terbentuknya nasionalisme sendiri itu mulai berkembang setelah Belanda membangun sekolah-sekolah. Sebelum itu orang Papua terpisah-pisah ada yang di Manokwarii, Jayapura, Nabire, Merauke. Itu semua terpisah dan orang Papua sendiri belum menyebut dirinya orang Papua” (wawancara, 15 Januari 2018). Sebelum Belanda masuk di Papua, orang Papua masih terpisah-pisah didaerahnya masing-masing. mereka belum mengenal antara satu dengan yang lain dan Identitas kepapuaan belum terbentuk waktu itu.

Konsep Kepapuaan berkembang ketika Belanda mulai membangun sekolah-sekolah di Papua. Orang-orang yang kini menyebut dirinya Papua kemudian berinteraksi antara satu dengan yang lain. Saat itu imajinasi dan konsep tentang Papua mulai tumbuh. Menurut Douw Konsep kepapuaan, kebersamaan dibangun oleh Belanda waktu itu. Setelah Belanda membangun sekolah dengan pola asrama kemudian membangun perasaan senasib”. Sekolah yang dibangun Belanda dengan pola sekolah asrama membangun rasa senasib sepenanggungan bagi mereka-mereka yang dikemudian hari menyebut dirinya orang Papua.

Namun pembangunan bangsa pada waktu itu masih belum kuat untuk memunculkan imajinasi sebagai sebuah bangsa. Orang Papua belum serempak untuk mengimajinasikan bahwa dirinya adalah orang Papua. Karena nama Papua sendiri sebenarnya bukan dari berasal dari orang Papua. Tetapi sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda menjadi awal bagi berkembangnya

nasionalisme Papua. Seperti penjelasan Douw “waktu itu pada dasarnya orang Papua belum menyebut dirinya Papua bahkan mungkin sampai sekarang karena penamaan Papua sendiri sebenarnya bukan dari Papua. Tapi pembangunan rasa nasionalisme dimulai dari itu”. Lalu orang-orang yang terdidik mulai memikirkan bahwa perlu membangun sebuah bangsa yang mandiri. Usaha tersebut kemudian menghasilkan janji dari pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan bagi Papua. Bahkan pada tanggal 1 Desember 1961 Belanda memberikan izin untuk Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi pembangunan bangsa Papua di ganggu dengan masuknya pemerintah Indonesia di Papua. Douw menjelaskan “orang-orang pemikirannya lebih maju mulai berfikir bahwa kita perlu membangun sebuah bangsa. Jadi mulai pada masa membangun sampai kemudian pemerintah Indonesia menduduki Papua” (wawancara 15 Januari 2018).

Sekarang menurut AMP KK Yogyakarta pembangunan nasionalisme Papua masih dalam tahap membangun. Kini AMP KK Yogyakarta membentuk identitas bersama melalui psikologi bersama. Mereka membangun psikologi bahwa rakyat Papua sampai saat ini tidak bisa menentukan nasibnya sendiri karena adanya Indonesia. Orang Papua tidak bisa berkembang meskipun teknologi dan zaman sudah berkembang. Orang Papua tidak bisa menentukan nasibnya sendiri mau jadi apa kedepan. Douw dengan tegas mengatakan “di bawah pemerintah Indonesia semua orang Papua walaupun kebudayaan dan teknologi sudah berkembang masih mengalami nasib yang sama bahwa dia tidak bisa berkembang dalam arti dia bebas menentukan nasib sendiri”.

AMP KK Yogyakarta membentuk identitas bersama yang dilandaskan pada psikologi bersama. Psikologi bersama tersebut yaitu orang Papua dari mana saja merasakan nasib yang sama. Nasib yang sama merujuk pada kondisi di Papua saat ini dimana mereka tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk memilih masa depannya. Rakyat Papua masih dalam ketertinggalan ketika bangsa lain sudah merasakan kemajuan. Kondisi tersebut tidak akan berubah apabila Papua masih bergabung dengan Indonesia. Artinya bahwa AMP membentuk identitas bersama bahwa mereka mengalami ketertindasan di bawah kekuasaan Indonesia.

AMP sendiri masih dalam upaya membangun nasionalisme Papua. Menurut AMP upaya pembangunan nasionalisme masih terus dilakukan sampai saat ini. Douw mengatakan “ Jadi proses pembangunan nasionalisme masih dalam tahap pembangunan sampai saat ini. AMP masih dalam upaya membangun nasionalisme Papua” (Douw, 2018). Mereka sadar bahwa pembangunan suatu bangsa harus terus dilakukan. Terlebih di Papua prasyarat bagi pembangunan bangsa masih belum semuanya di capai. Nasionalisme Papua memang sudah ada, tetapi perlu dilakukan pembangunan nasionalisme secara terus menerus. Mereka melihat bahwa identitas bersama masih belum kuat di benak rakyat Papua. “Pembangunan suatu bangsa disana ada kesamaan bahasa, kesamaan psikologi, kemudian aktifitas ekonomi bersama. cuman itu belum terbangun di Papua” (wawancara 15 Januari 2018).

Menurut Anderson (2008) nasionalisme tumbuh melalui salah satu diantaranya adalah *print capitalism*. *Print Capitalism* yang berbentuk media cetak dan buku memiliki peran untuk membangun identitas bersama dan

imajinasi sebagai sebuah bangsa. Media cetak dan buku memungkinkan seseorang meskipun terpisah secara jarak tetapi ikut merasakan penderitaan orang lain melalui berita atau tulisan. Sehingga orang tersebut merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang sama dengan seorang yang ada di dalam pemberitaan meskipun mereka belum pernah bertemu. teori print capitalism, Anderson dalam perkembangan yang lebih maju mewujud di dalam media sosial. Media sosial juga menjadi sarana dalam membentuk identitas bersama yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta.

Kini teknologi berjalan cukup pesat dan semakin maju. Sarana tumbuhnya nasionalisme tidak hanya melalui media cetak tetapi bisa melalui media sosial. AMP KK Yogyakarta menggunakan media sosial untuk membangun identitas bersama. Memberitahukan bahwa di Papua sedang mengalami kondisi yang tidak baik di bawah kekuasaan Indonesia. Psikologi bersama dibentuk melalui tulisan-tulisan yang di muat di media sosial. Kampanye di media sosial diharapkan membentuk identitas bersama melalui psikologi bersama bahwa penindasan dan perampasan hak terjadi di tanah Papua. di media sosial AMP memuat konten yang berisi pelanggaran-pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan kampanye kemerdekaan Papua. Namun AMP menyadari kalau mereka masih kurang dalam penyebaran ideologi yang diusung. Seperti yang dikatakan Douw “AMP lebih banyak menyebarkan persoalan-persoalan yang terjadi misalkan pelanggaran HAM, perampasan tanah, kalau penyebaran ideologisasi kami merasa masih kurang, kampanye kemerdekaan terus dilakukan”.

Media sosial menjadi sarana yang cukup ampuh untuk menyebarkan gagasan. AMP KK Yogyakarta menekankan pada anggotanya untuk

menuliskan gagasannya lalu disebar. Karena hal ini dijadikan sebagai cara untuk membangun identitas bersama dan juga merangkul orang lain untuk mendukung gerakan yang di usung oleh AMP. Dalam menyebarkan gagasannya biasanya AMP menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi di Papua karena adanya kolonialisme Indonesia. “kawan-kawan AMP dalam menyebarkan gagasannya biasanya menyimpulkan ini karena persoalan ini (kolonialisme Indonesia)” (wawancara 15 Januari 2018). Menurut AMP selama Indonesia masih di Papua persoalan-persoalan pelanggaran HAM, perampasan lahan, marjinalisasi orang asli Papua tidak akan pernah terselesaikan.

Demikianlah identitas bersama yang dibentuk oleh AMP, mereka menekankan pada psikologi bersama. Psikologi bersama itu tentang penindasan yang dilakukan Indonesia di tanah Papua. Perampasan lahan dan Pelanggaran HAM menjadi tema utama yang disuarakan oleh AMP dalam membentuk identitas bersama. Kedudukan Indonesia tidak membawa kepada kondisi yang lebih baik. Bahkan rakyat Papua tidak bisa menentukan nasib sendiri di masa depan karena kebebasannya telah dirampas oleh Indonesia.

## 2. Ideologi tentang sejarah bersama

Menurut Smith (1981) unsur penting kedua yang membentuk nasionalisme adalah ideologi tentang sejarah bersama. Disini akan dijelaskan bagaimana ideologi sejarah bersama Papua oleh AMP KK Yogyakarta. Sejarah memiliki pengaruh besar pada masa depan suatu bangsa. Karena untuk mengenal dirinya sendiri, suatu bangsa harus mengenal sejarahnya. Dengan mengerti sejarahnya sendiri maka suatu bangsa mengetahui dari mana dirinya berasal.

Papua memiliki sejarah yang berliku sampai kemudian menjadi bagian dari Indonesia. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Papua merupakan daerah jajahan Belanda. Indonesia menduduki Papua sejak tahun 1963 setelah melalui perundingan-perundingan Internasional. Pada tanggal 01 Mei 1963 Papua diserahkan ke dalam pangkuan RI oleh PBB melalui UNTEA (Alua A. A., 2006). Namun narasi sejarah tidaklah tunggal. Sebelum Indonesia masuk ke Papua, pemerintah Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua. Persiapan kemerdekaan Papua yang dibuat oleh Belanda dianggap oleh Indonesia sebagai pendirian negara boneka Papua. Padahal persiapan-persiapan Papua sebagai suatu bangsa yang merdeka sudah dilakukan pada saat itu.

AMP KK Yogyakarta menafsirkan sejarah bersama Papua sebagai penggabungan paksa Papua ke Indonesia. Douw mengatakan “kalau sejarah menjadi pikiran bersama bahwa persoalan yang terjadi adalah penggabungan paksa ke Indonesia”. Indonesia melakukan upaya-upaya mulai dari perundingan internasional sampai kekerasan secara fisik untuk menduduki Papua. “Jadi setelah masa-masa banyak negara di tahun 1940 an membebaskan diri dari kolonialisme, orang Papua waktu itu juga berusaha mendirikan negara” (wawancara 15 Januari 2018).

Usaha-usaha kemerdekaan Papua menurut Alua (2006) di dorong oleh konvensi PBB tentang dekolonisasi tahun 1960. Konvensi PBB mendorong negara-negara kolonial untuk membebaskan negara koloninya. Dalam rangka merespon konvensi PBB, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Josep Luns meluncurkan program 10 tahun pemberdayaan Papua (Alua A. A., 2006). Dalam rencana tersebut kemerdekaan Papua akan diserahkan secara

penuh pada akhir tahun 1970. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua sejumlah pemuda dan pelajar Papua dikirim ke Belanda untuk studi dan magang untuk sejumlah keterampilan teknis (Arseyam, 1997).

Semenjak Belanda meluncurkan program 10 tahun pemberdayaan Papua, Indonesia semakin gencar mengkampanyekan pengambil-alihan Papua. Pada tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno dalam pidatonya bertekad untuk membebaskan Irian Barat (saat itu belum menggunakan nama Papua) dengan kekuatan bersenjata. Menanggapi serangan yang dilakukan oleh Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 1961 pada masa Gubernur Plattel dibentuk suatu badan yang disebut KNP (Komite Nasional Papua) (Alua A. A., 2006). Komite ini dibuat karena ketegangan antara Belanda dan Indonesia yang semakin meningkat.

Komite Nasional Papua mengeluarkan manifesto Politiknya sebagai berikut (Arseyam, 1997): Berdasarkan hasrat dan keinginan bangsa kita sendiri; maka kami dengan perantaraan Komite Nasional dan Badan Perwakilan Rakyat kita Nieuw Guinea Raad mendorong Guvermen Nederlands - Nieuw – Guinea dan pemerintah Nederlans supaya mulai 1 November 1961; 1) Bendera kami dikibarkan di samping Bendera Belanda Nederlands. 2) Nyanyian kebangsaan kita (kami) ‘Hai Tanahku Papua’ dinyanyikan atau dilagukan di samping Wilhelmus. 3) Nama tanah kami menjadi Papua Barat. 4) Nama bangsa kami menjadi Papua.

Saat itu pada tanggal 1 November 1961 direncanakan untuk mengibarkan bendera bintang kejora namun gagal. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1961 atas persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda, Komite Nasional Papua (KNP)



mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat di Hollandia (kini Jayapura) (Alua A. A., 2006). Ini yang menjadikan sejarah bersama rakyat Papua khususnya AMP KK Yogyakarta bahwa Papua sudah menjadi sebuah negara. Seperti yang dikatakan oleh pical “Papua jika saya ibaratkan sebelum masuk ke Indonesia adalah anak yang sudah lahir. Negara Papua itu sudah ada sebelum Indonesia masuk ke Papua” (wawancara 23 Januari 2018).

Hadirnya Indonesia ke Papua menggagalkan kemerdekaan Papua yang sudah dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961. Usaha-usaha perundingan internasional dilakukan oleh Indonesia untuk merebut Papua ke tangan Indonesia. Hasilnya Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia mengenai Irian Barat, Perjanjian tersebut dikenal dengan nama *New York Agreement*. Namun didalam proses pembuatan *New York Agreement* tidak dilibatkan satupun orang Papua. Selain itu, Amerika Serikat mempunyai peran yang besar di balik keluarnya *New York Agreement*. Alua (2006) mengungkapkan kalau pemerintah Belanda ditekan oleh Amerika Serikat untuk menyetujui perjanjian New York.

Douw mengatakan “Setelah banyak persoalan antara Belanda dan Indonesia kemudian juga terdapat perundingan di tingkat internasional ternyata orang Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasibnya”. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar rakyat Papua. Mereka merasa dipermainkan dan hanya dijadikan objek atas suatu masalah. Menurut Douw penggabungan Papua kedalam Indonesia sendiri ada istilahnya semacam *kongkalikong* antara Indonesia dan Amerika dan Freeport.

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat diserahkan kepada Indonesia. Indonesia diberikan kewenangan untuk mempersiapkan jejak pendapat rakyat Papua atau yang biasa dikenal dengan sebutan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilakukan pada tahun 1969. Penyerahan ke Indonesia adalah penyerahan di bawah Administrasi (perwalian) Indonesia, bukanlah penyerahan kekuasaan dan kedaulatan (Alua A. A., 2006). Namun Indonesia justru menafsirkan sebagai peralihan kekuasaan sehingga yang dilakukan Indonesia selama enam tahun di Papua adalah bertindak sebagai penguasa. Douw mengatakan “mulai tahun 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan atau mandat kepada Indonesia untuk melaksanakan pepera. Pada saat itu juga banyak terjadi tekanan-tekanan” (wawancara 15 Januari 2018).

Selama kedudukan Indonesia di Papua sebelum diadakannya pepera pada tahun 1969 disebut oleh LIPI (2009) sebagai awal kekerasan yang dilakukan Indonesia kepada Papua. Kekerasan ini bertujuan untuk menggagalkan negara Papua yang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh KNP. Tujuan yang kedua adalah untuk memenangkan pepera agar memastikan Papua masuk menjadi bagian dari NKRI. Pemerintah Indonesia sangat sibuk sekali memenangkan pepera 1969 dengan melakukan berbagai teror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (Alua A. A., 2006). Kekerasan tersebut ditujukan kepada masyarakat Papua yang mempertahankan kemerdekaannya dan tidak mau bergabung dengan Indonesia.

Pepera yang dilakukan pada tahun 1969 menghasilkan kemenangan untuk Indonesia yang cukup kontroversial. Pepera dilakukan dengan cara menggunakan sistem perwakilan. sistem perwakilan tersebut ditentang oleh

kelompok pro kemerdekaan yang mengajukan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*). Tidak hanya itu, kekerasan yang dilakukan pemerintah Indonesia menjelang pepera menjadi luka yang mendalam bagi rakyat Papua. Pelaksanaan pepera dianggap cacat hukum dan cacat moral. Kemenangan pepera 1969 adalah hasil rekayasa politik Indonesia, terutama melalui OPSUS (Operasi Khusus) yang diketuai oleh Ali Murtopo (Alua A. A., 2006). Akibat operasi tersebut banyak terjadi pelanggaran HAM kepada rakyat Papua.

Sejarah bersama Papua ditafsirkan bahwa Papua sudah menjadi negara merdeka pada 1 Desember 1961. Papua sudah mempersiapkan diri untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Infiltrasi Indonesia merupakan aneksasi kemerdekaan Papua. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda tidak melibatkan satupun orang Papua. Sehingga orang Papua hanya dijadikan objek dalam sengketa antar Indonesia dan Belanda. Kemenangan pepera untuk Indonesia adalah cacat hukum dan cacat moral. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia untuk memenangkan pepera dan pepera yang menggunakan sistem perwakilan bukan sistem satu orang satu suara. Terkait pepera Pical mengatakan “pepera adalah cara mengindonesiakan Papua. Papua di *caplok* sebagai Indonesia, Harus ada pelurusan sejarah terkait Papua. Apa yang menjadi sejarah Papua bahwa Papua pernah pada awalnya menjadi negara sendiri” (wawancara 23 Januari 2018).

### 3. Rasa senasib sepenanggungan

Unsur pembentuk nasionalisme yang ketiga adalah adanya rasa senasib sepenanggungan. Rasa senasib sepenanggungan ini berdasarkan apa yang

mereka rasakan bersama. Rasa tersebut ada karena peristiwa yang benar-benar terjadi. Pengalaman bersama akhirnya membentuk ingatan kolektif. Seperti yang dikatakan oleh Lane (2017) bangsa adalah suatu gambar yang lahir dari pengalaman dan tafsirannya terhadap pengalaman itu. Tafsiran bersama atas pengalaman itulah yang membentuk rasa senasib sepenanggungan.

Rakyat Papua telah merasakan sejarah yang kelam di tanah kelahirannya. Bahkan peristiwa-peristiwa kelam tersebut sampai sekarang masih kerap terjadi. Pembunuhan, pelanggaran HAM, kekerasan, perampasan tanah, stigmatisasi adalah beberapa hal yang dirasakan oleh rakyat Papua. AMP KK Yogyakarta melihat kekerasan, pelanggaran HAM, pembunuhan, stigmatisasi, dan perampasan tanah merupakan rasa senasib sepenanggungan yang dialami oleh seluruh rakyat Papua.

AMP mulai melihat banyaknya persoalan-persoalan yang ada di Papua, mulai dari perampasan tanah, pembunuhan, banyak hak perempuan yang dilanggar. AMP mengkaji pengalaman-pengalaman real yang telah dilewati oleh rakyat Papua sebagai suatu hal yang tidak manusiawi. Perlakuan-perlakuan yang dilakukan negara melalui aparaturnya telah mendehumanisasi rakyat Papua. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Praktik kekerasan hingga pembunuhan adalah bukti yang sah dari pelanggaran HAM oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh Pical Permasalahan HAM sudah cukup lama menjangkit Papua. Ini tidak terlepas dari gaya pemerintah yang lebih mengedepankan pada pendekatan militeristik. Ketika upaya yang dilakukan dengan militer, maka jatuhnya adalah kekerasan yaitu pelanggaran HAM.

Pical sebagai orang asli Papua melihat bahwa selama ini pemerintah cenderung menggunakan pendekatan keamanan secara militeristik. Cara yang dilakukan pemerintah menyebabkan terjadinya kekerasan – kekerasan bahkan sampai berujung pada pembunuhan. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri jika sejarah Papua bersama Indonesia diselimuti dengan kekerasan struktural. Pengalaman-pengalaman terhadap kekerasan tersebut mengkrystal diingatan rakyat Papua. Kekerasan menjadikan luka yang dalam dan rasa traumatis.

Kekerasan yang terus terjadi di Papua membuat pengalaman bersama ini abadi dan melewati lintas generasi. Dari awal bergabung dengan Indonesia hingga saat ini, kekerasan belum berhenti dan terus terjadi. Pengalaman bersama orang Papua terhadap kekerasan politik menumbuhkan ingatan kolektif tentang penderitaan atau disebut “*memoria passionis*”. Pengalaman kekerasan telah mengakibatkan trauma psikologis di kalangan orang Papua, khususnya bagi mereka yang menjadi korban secara langsung dari pendekatan militer di Papua (Widjoyo dkk, 2009).

Ingatan kolektif tentang penderitaan atau *memoria passionis* ini mengakibatkan rakyat Papua merasa menjadi warga negara kelas dua. Tidak ada jaminan sebagai warga negara yang diberikan kepada rakyat Papua. Kekerasan yang dilakukan justru aktor utamanya adalah aparaturnegara menunjukkan kekerasan struktural yang terjadi di Papua. Kekerasan yang dilakukan oleh negara dilakukan berulang-ulang. Karena itu, Matius Murib, Aktivis HAM Papua (27 April 2013) mengatakan, rakyat di Tanah Papua mulai tidak percaya dan meragukan lagi kemauan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakannya terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi

Manusia di Tanah Papua (Kossay, 2015). Jaminan HAM, dan rasa keadilan kian menjauh dari tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam.

Rakyat Papua juga merasakan dirinya di stigma sebagai kelompok separatis apabila menonjolkan kebudayaan Papua. Pemerintah melalui aparat militer seperti cukup anti dengan simbol kebudayaan Papua seperti bendera bintang kejora. Apabila ada yang kedapatan membawa bendera bintang kejora atau simbol tersebut, maka militer langsung mengurus dan menjustifikasi orang tersebut sebagai separatis. Pical mengatakan Segala sesuatu yang berbau kebudayaan Papua semisal bintang kejora dianggap sebagai representasi separatisme. Masyarakat yang kedapatan menggunakan atau membawa atribut tersebut langsung justifikasi sebagai separatis dan militer yang mengurus. Kenakalan remaja bahkan kerap dijadikan dalih oleh militer untuk melakukan kekerasan dan menuduh sebagai separatis. Stigma seperti ini membuat masyarakat Papua tidak bebas di dalam melakukan ekspresi kebudayaan. “Bahkan kenakalan remaja juga sering dianggap sebagai separatis oleh militer. Ini adalah permasalahan akut” (wawancara 23 Januari 2018).

Perlakuan yang tidak mengenakkan ketika menggunakan simbol kebudayaan Papua juga dirasakan oleh pejuang kemerdekaan Papua yaitu Filep Karma. Karma diperiksa oleh personel TNI Angkatan Udara dan petugas keamanan Bandar Udara Soekarno-Hatta karena menggunakan pin bintang kejora. Karma diintimidasi dari jam 9 malam sejak dia tiba di Bandara Soekarno-Hatta karena memakai pin bintang kejora yang tersemat pada bagian dada pakaiannya (Widhana & Nathaniel, 2018). Filep Karma kemudian dibebaskan sekitar jam 1 dini hari Rabu, 3 Januari 2018. Berkaca dari peristiwa

tersebut, memperlihatkan bagaimana stigma terus terjadi kepada rakyat Papua yang mengekspresikan kebudayaannya. Ada pembatasan ruang berekspresi bagi rakyat Papua karena stigma yang mengakar. Karma mengatakan “sifat seperti ini yang membuat kami tidak senang, merasa tidak nyaman hidup di Indonesia”, karma menyebut “kami” sebagai “rakyat Papua” (Widhana & Nathaniel, 2018).

Stigma yang terus dilakukan akhirnya membentuk rasa senasib sepenanggungan bahwa hampir seluruh rakyat Papua diperlakukan tidak manusiawi apabila mengekspresikan kebudayaannya. Perasaan diperlakukan dengan tidak adil oleh negara muncul karena ruang berekspresi yang batasi. Konsekuensinya adalah kekecewaan rakyat Papua kepada eksistensi negara yang selalu menekan. Stigma buruk tidak hanya dilakukan karena ekspresi kebudayaan, tetapi juga di stigma buruh dalam bentuk merendahkan martabat. Misalnya, orang Papua bodoh, pemabuk, pencuri, pemalas, dan stigma lain yang memojokkan harga diri dan martabat kemanusiaan (Kossay, 2015). Padahal perilaku tersebut dilakukan oleh personal tetapi digeneralisir kepada seluruh orang Papua seolah-orang orang Papua berperilaku sama.

Konsekuensi logis dari stigmatisasi ekstrim seperti itu, ternyata turut mempengaruhi rasa kekecewaan yang mendalam dari warga Papua terhadap eksistensi negara (Kossay, 2015). Stigma terhadap rakyat Papua terjadi sudah lama dan sudah pada kondisi ekstrim. Stigma sebagai separatis sering ditujukan kepada orang Papua yang kritis terhadap pemerintahan Indonesia. Di kota-kota besar, orang Papua kerap di diskriminasi secara perlakuan seperti sulitnya mendapat tempat tinggal. Penulis melihat sendiri diskriminasi terhadap orang

Papua yang terjadi di Kota Jogjakarta. Saat itu ada mahasiswa Papua yang sedang mencari kos sebagai tempat tinggal. Mahasiswa tersebut bertanya kepada penulis apakah ada tempat kosong. Penulis menjawab ada dan langsung penulis arahkan ke pemilik kos. Beberapa menit kemudian mahasiswa tersebut keluar dan bilang kalau kamar sudah dipesan oleh orang lain. Tidak lama berselang, pemilik kos mendatangi penulis dan bilang “kalau ada orang Papua lagi yang tanya kos, tidak usah diterima. Mereka sering bikin onar dan pemabuk”. Peristiwa tersebut mencerminkan stigma yang begitu mendalam disematkan kepada orang Papua.

Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam di Papua tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan hidup rakyat Papua. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masih sulit bagi rakyat Papua. Pembangunan-pembangunan dilakukan, industrialisasi banyak berkembang tetapi rakyat Papua tidak merasakan kemajuan taraf hidup. “Disana Papua menghasilkan APBN yang banyak melalui kekayaan alam Papua tetapi pendidikan di Papua untuk memajukan budaya orang Papua sendiri itu masih minim, di tambah biaya sekolah kian mahal” (wawancara 15 Januari 2018). Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta minim manfaat bagi rakyat Papua. Ini menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan bahwa di tanah kelahiran sendiri yang kaya akan sumber daya alam, rakyat Papua masih terus saja menderita.

Perasaan akan penderitaan yang terjadi di Papua mulai dari perampasan lahan, pembunuhan, pelanggaran HAM, stigma, krisis kebebasan kemudian dianalisis oleh AMP KK Yogyakarta. AMP mencobamelihat runtut bagaimana



sejarah persoalan-persoalan yang membuat penderitaan terus terjadi di Papua. AMP berkesimpulan bahwa penderitaan rakyat Papua berhubungan erat dengan kekuasaan Indonesia di Papua. Ada kolonialisme yang sedang terjadi di Papua yang mengakibatkan terenggutnya kebebasan di Papua, maraknya kekerasan, pelanggaran HAM dan pembunuhan. “Kemudian kenapa aspirasi orang Papua sendiri dalam kondisi seperti itu masih bicara soal itu, membebaskan diri dari kolonialisme Indonesia. dari kondisi itu kemudian kami melihat dari sejarah panjang orang Papua mulai dari Belanda kemudian Indonesia jadi kami melihat ada persoalan kolonialisme di Papua” (wawancara 15 Januari 2018). Puncak dari rasa senasib sepenanggungan rakyat Papua khususnya AMP KK Yogyakarta, mulai dari perampasan tanah, pelanggaran HAM, kekerasan, pembunuhan, stigma, krisis kebebasan adalah perasaan sebagai bangsa yang sedang dijajah. Bangsa Papua kini sedang dalam kolonialisme Indonesia dan rasa sebagai bangsa koloni yang berakibat pada penderitaan-penderitaan di Papua ditanggung oleh seluruh rakyat Papua.

#### 4. Tujuan bersama AMP KK Yogyakarta

Unsur penting yang terakhir atau keempat menurut Smith (1981) adalah adanya tujuan bersama yang diinginkan. Tujuan bersama disini akan memperlihatkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh suatu kelompok atau komunitas politik, dalam hal ini AMP KK Yogyakarta. Pada bagian ini akan menguraikan tujuan bersama versi AMP KK Yogyakarta untuk Papua. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kesadaran identitas bersama,

sejarah ideologi bersama, dan rasa senasib sepenanggungan. di dalam rasa senasib sepenanggungan AMP KK Yogyakarta menyimpulkan bahwa ada persoalan kolonialisme di Papua.

AMP secara umum memiliki orientasi perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Hal tersebut bisa dilihat dari platform dan misi AMP. Dalam orientasi perjuangannya tersebut, AMP merupakan bagian integral dari gerakan pembebasan nasional Papua Barat dan agenda untuk kemerdekaan Papua Barat harus dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya. Seperti yang tertera di dalam profil AMP yang menyatakan “Aliansi Mahasiswa Papua memiliki orientasi perjuangan yang dengan tegas telah diatur untuk memperjuangkan kemerdekaan West Papua” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). AMP juga menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan bagian dari secara keseluruhan gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat. Profil AMP menyatakan sebagai berikut “Perjuangan AMP adalah bagian integral dari Gerakan Pembebasan Nasional West Papua, tidak ada orientasi lain, selain orientasi tersebut yang harus diperjuangkan dalam jangka waktu yang sangat cepat” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013).

Dalam platformnya AMP secara gamblang menyatakan melawan neo-kolonialisme Indonesia, imperialisme global dan militerisme Indonesia. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Indonesia hadir di tanah Papua melalui militer yang melakukan serangkaian kekerasan. Selain itu, bergabungnya Papua ke Indonesia juga melalui campur tangan negara-negara lain dan perundingan Internasional. Berikut Platform AMP selengkapnya “Melawan

neo-kolonialisme Indonesia, melawan neo-liberalisme/imperialisme ekonomi global dan melawan militerisme Indonesia” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013).

Sedangkan dalam visinya, AMP bertekad membebaskan negeri West Papua dari segala bentuk penjajahan dan membentuk negara West Papua yang mandiri. Selengkapnya visi AMP sebagai berikut “Membebaskan negeri West Papua dari segala macam bentuk penindasan penjajahan bagi umat manusia dan menciptakan rakyat West Papua yang berdaulat secara politik, dengan pembentukan negara West Papua yang mandiri” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Dari visi tersebut dapat diketahui bahwa AMP memiliki tujuan untuk membentuk negara West Papua atau Papua Barat yang mandiri dan berdaulat.

Secara garis besar AMP KK Yogyakarta merupakan bagian integral dari AMP. Tidak ada perbedaan orientasi perjuangan antara AMP KK Yogyakarta dengan AMP. Namun disini akan dijelaskan secara lebih rinci tujuan bersama dari AMP, menurut AMP KK Yogyakarta. Pada awalnya AMP berdiri karena melihat banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan seperti kekerasan, pelanggaran HAM, perampasan tanah, pelanggaran hak perempuan, sampai pada pembunuhan. Peristiwa Biak berdarah, menjadi titik balik AMP untuk bertekad menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Menurut mahasiswa Papua yang tergabung di dalam AMP kala itu dibutuhkan organisasi mahasiswa Papua yang konsisten dalam menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. seperti yang dikatakan oleh Douw

“ AMP mulai melihat banyaknya persoalan-persoalan yang ada di Papua. Mulai dari perampasan tanah , pembunuhan, banyak hak perempuan yang dilanggar. Pokoknya dari persoalan-persoalan yang terjadi itu kawan-kawan mulai mendalami sebenarnya akar persoalannya ini apa” (wawancara 15 januari 2018).

AMP mencoba mencari akar permasalahan yang terjadi di Papua yang mengakibatkan penderitaan-penderitaan kepada rakyat Papua selama ini. Dari situ AMP melihat bahwa permasalahan yang terjadi di Papua berhubungan dengan sejarah Papua. Sejarah Papua tersebut mulai dari kolonialisme yang dilakukan Belanda di Papua sampai pada saat ini hadir Indonesia di Papua. Berawal dari infiltrasi Indonesia ke tanah Papua, dimulailah serangkaian kekerasan yang menimpa rakyat Papua. Sepanjang kependudukan Indonesia di Papua, sejarah Papua diselimuti dengan kekerasan serta pelanggaran HAM.

Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut mulai dari kesuburan tanah, hutan yang luas, keanekaragaman hayati, hingga emas. Hadirnya Indonesia di Papua kemudian diikuti dengan gelombang investasi yang masuk ke tanah Papua. Investasi yang paling dikenal luas dan selama ini menimbulkan persoalan yang akut di Papua adalah PT Freeport Indonesia. Eksploitasi alam besar-besaran dimulai di tanah Papua seiring dengan hadirnya Indonesia di bumi cendrawasih tersebut.

Dari persoalan-persoalan tersebut kemudian AMP melihat bahwa akar permasalahan Papua berhubungan dengan kekuasaan Indonesia di Papua. Ada kolonialisme di tanah Papua yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Indonesia. Douw mengatakan bahwa dari situ AMP melihat berbagai persoalan mulai dari perampasan – perampasan punya hubungan erat dengan kekuasaan Indonesia di Papua. AMP berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka harus dicabut dari akar permasalahan yaitu kekuasaan Indonesia. Jika ingin menyudahi

penderitaan-penderitaan yang tidak manusiawi maka tahap awal bagi rakyat Papua adalah melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia.

Kemerdekaan Papua akan mengantarkan Papua selangkah lebih maju untuk menyudahi penderitaan yang sekian lama dialami. Menurut AMP jika Papua masih berada dalam kekuasaan Indonesia maka persoalan-persoalan yang selama ini terjadi tidak akan pernah selesai. “Papua harus melepaskan diri. Jadi ada proses – proses sejarah yang membuat AMP berkesimpulan bahwa selama berada di bawah kekuasaan Indonesia berarti persoalan-persoalan perampasan tidak akan selesai” (wawancara 15 Januari 2018). Bagi AMP sejak awal keberadaan Indonesia di Papua sudah menyalahi aturan karena melakukan pemaksaan. Indonesia memaksakan kehendaknya untuk mengambil Papua menjadi bagian dari Indonesia. Douw mengatakan “Karena ada pemaksaan dalam proses masuknya Papua ke Indonesia”.

Orientasi perjuangan AMP untuk membebaskan Papua dari kolonialisme Indonesia menjadi landasan dalam tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh AMP. Di dalam tuntutan-tuntutannya AMP selalu menyatakan kalau masih berada di tangan Indonesia, Papua tidak akan bebas. Jalan bagi Papua untuk lepas dari penderitaan adalah memerdekakan diri menjadi negara West Papua. Seperti yang dikatakan oleh Douw “Dalam tuntutan-tuntutan kawan-kawan AMP sadar bahwa kalau Papua tetap berada di dalam Indonesia berarti persoalan-persoalan ini tidak akan pernah selesai” (wawancara 15 Januari 2015).

Namun bagi AMP dengan berhasilnya kemerdekaan Papua tidak lantas membuat perjuangan berhenti. Pembebasan nasional Papua Barat hanya tahap

awal. Papua bisa jadi lepas dari cengkraman Indonesia tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Akan ada tantangan-tangan selanjutnya untuk menjamin kesejahteraan di Papua. Membebaskan Papua dari Indonesia merupakan tahap awal untuk membuka ruang demokrasi di Papua. Perspektif AMP sendiri perjuangan terutama pembebasan Indonesia atau pembebasan nasional merupakan taktik awal AMP terutama dalam membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi Papua. Sekalipun kemerdekaan bagi Papua telah diraih, AMP terus berjuang untuk Papua yang lebih baik. Hal-hal yang akan tetap diperjuangkan AMP setelah kemerdekaan tercapai yaitu membangun suatu tatanan masyarakat baru yang demokratis secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, partisipatif secara budaya.

Menurut AMP proses pembangunan bangsa dilakukan secara terus menerus. Hal itu dikarenakan persoalan kebangsaan yang tidak akan pernah selesai. Persoalan kebangsaan akan terus terjadi seiring dengan adanya pertentangan kelas di kehidupan manusia. Persoalan kebangsaan akan selesai ketika persoalan kelas juga sudah selesai. Artinya terhapusnya masyarakat berkelas dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kebangsaan. Oleh karena itu, AMP tidak hanya memperjuangkan nasionalisme Papua, tetapi juga memperjuangkan semangat internasionalisme. “AMP berfikir tidak hanya soal nasionalisme tetapi mencoba untuk memperjuangkan semangat internasionalisme” Kata Douw (wawancara 15 Januari 2018).

Di dalam orientasi perjuangannya AMP menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan bagian integral dari gerakan pembebasan nasional Papua Barat. Kesatuan sebagai gerakan pembebasan nasional tersebut berlaku secara

kultural tidak secara organisatoris. Secara organisatoris AMP independen dan tidak terikat dengan organisasi manapun. Namun pada prinsipnya AMP satu tujuan untuk memperjuangkan pembebasan nasional Papua Barat. Jadi didalam perjuangan itu banyak terdapat organisasi-organisasi. Kalau AMP terpisah dari semua itu. Dalam perjuangan pembebasan nasional Papua Barat terdapat faksi-faksi yang terbagun mulai dari militer, diplomasi, dan gerakan di Kota. Tetapi dalam menjalankan perjuangannya AMP tetap melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi lain yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Menurut Niwandhono (2011) dalam perwujudan gerakan nasionalisme terbagi menjadi dua varian. Varian yang pertama yaitu gerakan elitis dan yang kedua gerakan populis. Gerakan elitis lebih menekankan atau memberi tempat pada pengembangan intelektualitas panpenciptaan kader-kader pemimpin, sedangkan gerakan populis menekankan gerakan nasionalis kepada lapisan masyarakat yang lebih luas. Untuk konteks AMP KK Yogyakarta, gerakan mereka merupakan kombinasi dari gerakan elitis dan gerakan populis. AMP KK Yogyakarta melakukan perkaderan dalam bentuk pendidikan tertutup dan pendidikan terbuka. Kegiatan dalam bentuk pendidikan tertutup dan pendidikan terbuka tersebut untuk terus mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Namun mereka tetap menysar perjuangan kepada seluruh masyarakat Papua. Karena bagi AMP setiap individu harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Douw mengatakan “AMP sendiri mencoba untuk mendorong kawan-kawan untuk tidak hanya istilahnya mendidik segelintir orang tetapi mencoba merangkul semua masyarakat Papua” (wawancara 15 Januari 2018).

Pendidikan tertutup merupakan sarana ideologisasi kepada mahasiswa-mahasiswa Papua yang ingin bergabung dengan AMP. Sedangkan pendidikan terbuka dalam bentuk diskusi-diskusi yang dilakukan secara terbuka dan diskusi di internal Papua sendiri. Sebagaimana dikatakan Douw “ kalau pendidikan terbuka itu seperti diskusi-diskusi terbuka, diskusi internal sendiri. Kalau tertutup lebih ke pendidikan ideologisasi kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan AMP” (wawancara 15 Januari 2018).

Perjuangan untuk kemerdekaan Papua terus dilakukan oleh AMP secara menyeluruh. Pada tanggal 1 Desember 2017 AMP melakukan aksi di Jakarta. Aksi tersebut gabungan antara AMP dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP) gabungan wilayah Jawa dan Bali. Para demonstran menyanyikan lagu “Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kalu bilang merah putih” (Widhana, 2017). Hal ini menandakan bahwa nasionalisme Papua terus tumbuh dan perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat tidak hanya diperjuangkan oleh orang Papua saja.

#### D. Wacana dan Praktek Demokrasi

Terdapat beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Sorensen (2003) berpendapat bahwa dimensi demokrasi begitu luas sehingga pengertian demokrasi yang tunggal dan mutlak sangat sukar untuk ditentukan. Tetapi dalam rangka memahami demokrasi, Sorensen menggunakan dua konsep demokrasi yaitu demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter dan demokrasi dalam arti luas menurut David Held. Menurut Schumpeter dalam (Sorensen, 2003) demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode



politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik. Sedangkan demokrasi dalam arti luas menurut Held adalah orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan tidak menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain (Held, 2003).

Dengan kata lain merujuk pada pengertian di atas maka demokrasi dapat diartikan sebagai tatanan politik dan bermasyarakat dimana didalamnya terdapat partisipasi masyarakat secara sadar tanpa adanya suatu paksaan dan masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, berserikat, serta berorganisasi. Substansi demokrasi adalah masyarakat sipil diberikan kebebasan untuk menyuarakan kepentingannya dalam bernegara dan tidak ada diskriminasi terhadap kebebasan sipil.

Di dalam tatanan negara yang demokratis tentunya dibutuhkan pemerintah yang demokratis agar menjamin berjalannya demokrasi. Untuk menjamin pemerintah berperilaku demokratis menurut Dahl (1999) rakyat harus diberi kesempatan untuk: Pertama merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; kedua memberitahukan perihal preferensinya kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan ketiga mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.

Disini akan dibahas apakah pemerintah Indonesia sudah berperilaku demokratis dengan menjamin hak-hak AMP secara umum dan AMP KK Yogyakarta secara khusus. Di dalam negara yang demokratis AMP KK Yogyakarta sebagai organisasi mahasiswa tentunya harus memiliki hak dan jaminan untuk menyuarakan kepentingannya. Untuk mengetahui apakah negara sudah berperilaku demokratis terhadap AMP KK Yogyakarta akan di analisis menggunakan teori Dahl.

1. Tidak adanya jaminan kepada (AMP) untuk merumuskan preferensinya sendiri

Bersama dengan runtuhnya rezim otoriter orde baru Soeharto keran demokrasi di Indonesia mulai terbuka. Suara-suara yang tertutup pada masa orde baru mulai muncul kepermukaan untuk menuntut haknya. Pada masa orde baru, suara-suara kritis dibungkam dan tidak ada jaminan kepada masyarakat untuk merumuskan kepentingannya sendiri. Pemerintah waktu itu mempunyai kekuasaan sangat absolut terhadap warga negara, hal ini menandakan pemerintah yang tidak berperilaku demokratis.

Suara-suara masyarakat yang menuntut haknya sebagai warga negara menyeruak bersama dengan jatuhnya orde baru. Orde baru banyak merampas hak masyarakat sebagai warga negara, hak tersebut mencoba kembali di raih ketika orde baru tumbang. Rakyat Papua menjadi salah satu yang cukup kancang untuk menyuarakan hak-haknya yang dirampas oleh negara. Bersama dengan kejatuhan Soeharto, di Papua terjadi gejolak besar-besaran menuntut

hak menentukan nasib sendiri. Ruang demokrasi yang mulai terbuka dimanfaatkan rakyat Papua untuk menyerukan kemerdekaan.

AMP merupakan organisasi yang berdiri ketika ruang demokrasi saat itu mulai terbuka bersamaan dengan kejatuhan Soeharto. Pada tahun tanggal 30 Mei 1998 AMP berdiri sebagai organisasi. Mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP merasa perlu untuk membentuk organisasi mahasiswa Papua yang konsisten dalam menyoroti permasalahan di Papua. Dalam tahap ini mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP dan selaku warga negara mulai merumuskan sendiri preferensi atau kepentingannya.

Peristiwa Biak berdarah menjadi titik tolak AMP dan semakin membulatkan tekad untuk konsisten menyuarakan permasalahan di Papua. Biak berdarah adalah peristiwa dimana rakyat Papua yang dipimpin Filep Karma menuntut kemerdekaan dan ditanggapi dengan cara kekerasan oleh militer Indonesia. Rakyat Papua di bawah pimpinan Filep Karma mengibarkan bendera bintang kejora di tower Biak. Mereka menuntut dengan damai kemerdekaan untuk Papua. Aksi yang dilakukan secara damai ini kemudian direspon dengan kekerasan oleh militer yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah pengibaran bendera banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan kepada rakyat Papua. Mahasiswa Papua yang tergabung didalam AMP awalnya menyuarakan agar negara bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

AMP kemudian mendalami berbagai permasalahan yang terjadi di Papua. Permasalahan-permasalahan tersebut mulai dari perampasan tanah, eksploitasi sumberdaya alam, kekerasan, pelanggaran HAM, tidak adanya kebebasan di Papua, dan pembunuhan. AMP menyimpulkan bahwa akar dari semua

persoalan tersebut adalah adanya kolonialisme yang dilakukan Indonesia di Papua. Atas dasar itu AMP memiliki tujuan organisasi untuk membebaskan Papua dari kolonialisme Indonesia dan membentuk negara West Papua. AMP sebagai organisasi dan warga negara merumuskan kepentingannya sendiri untuk memerdekakan Papua dan berpisah dari Indonesia. Visi AMP adalah membebaskan negeri West Papua dari segala macam bentuk penindasan penjajahan bagi umat manusia dan menciptakan rakyat West Papua yang berdaulat secara politik, dengan pembentukan negara West Papua yang mandiri (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Untuk mewujudkan kemerdekaan Papua, AMP menuntut hak menentukan nasib sendiri dengan diadakannya referendum bagi Papua.

AMP di bentuk pada saat negara Indonesia sedang dalam proses demokratisasi. Indonesia yang sedang menuju arah demokrasi membuat organisasi AMP bisa eksis di Indonesia. Namun bukan berarti berdirinya AMP di era demokrasi ini berarti negara sudah memberikan jaminan kepada AMP. Selama ini tidak ada jaminan dari negara dalam memberikan hak bersuara untuk AMP. Tuntutan dan kepentingan AMP untuk kemerdekaan Papua membuat negara tidak memberikan jaminan kepada organisasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Douw “tuntutan ini memang *strong*. Tidak ada jaminan hak dari negara untuk AMP bersuara” (wawancara 15 Januari 2018).

Apa yang dikatakan oleh Douw tercermin saat AMP KK Yogyakarta melakukan aksi kemudian di hadang oleh kepolisian dan organisasi masyarakat (ormas) di Yogyakarta. AMP KK Yogyakarta kerap melakukan aksi menuntut kemerdekaan Papua di hari-hari tertentu yang berhubungan dengan sejarah

Papua, contohnya pada tanggal 1 Desember. Pembungkaman terhadap AMP khususnya AMP KK Yogyakarta yang paling parah terjadi pada tanggal 15 Juli 2016. Saat itu AMP berencana melakukan aksi *Long March* dari Asrama mahasiswa Papua di jalan Kusumanegara ke titik 0 kilometer Jogja. Aksi tersebut merupakan bagian dari aksi damai mendukung Gerakan Pembebasan Papua atau *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group* (MSG) (Kusumadewi, 2016).

Aksi yang akan segera dilakukan tersebut gagal karena titik kumpul massa aksi di asrama mahasiswa Papua yang terletak di Jalan kusumanegara dikepung oleh ormas dan polisi. Mahasiswa Papua yang terkepung kemudian terisolir selama dua hari di dalam asrama. Saat pengepungan, terdengar lontaran-nama-nama hewan dan kata-kata rasialis kepada mahasiswa Papua. Menurut mahasiswa Papua itu, aparat kepolisian yang berjaga di sekeliling asrama mendiamkan saja perilaku rasis tersebut (Kusumadewi, 2016). Setelah kejadian tersebut, pemerintah DIY melalui Gubernur mengatakan bahwa tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Pernyataan Sultan itu dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2016, Sultan meminta separatis untuk tak tinggal di Yogya (Kusumadewi, 2016).

Peristiwa pembungkaman terhadap AMP KK Yogyakarta terjadi berkali-kali. Tanggal 6 Agustus 2014 AMP KK Yogyakarta melakukan aksi menuntut kemerdekaan Papua yang dihadang oleh sekelompok ormas. Kemudian pada 15 Agustus 2014 AMP KK Yogyakarta kembali melakukan aksi menuntut kemerdekaan untuk Papua. Aksi tersebut juga mendapat hadangan dari sekelompok ormas yang mengatasnamakan Masyarakat Jogja Cinta Damai.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 1 Juli 2014. AMP KK Yogyakarta berencana melakukan aksi memperingati hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM) lalu di hadang oleh ormas. Pihak keamanan Kraton Yogyakarta 'Paksi Kraton' melarang mahasiswa melakukan aksi demo ke titik nol (Prabowo, 2014). Pemerintah juga memblokir website AMP yang bernama ampnews.org. Media yang dijadikan sarana AMP untuk menyebarkan gagasan tersebut dilarang oleh pemerintah.

Kejadian pembungkaman terhadap AMP KK Yogyakarta yang terjadi berkali-kali menunjukkan bahwa jaminan kepada masyarakat untuk merumuskan kepentingannya sendiri belum ada secara maksimal. Pemerintah diam ketika hak warga negara (baca:AMP) untuk menyuarakan pendapat dibungkam oleh warga negara yang lain bahkan juga oleh aparat negara. Maka bisa dikatakan meskipun hadirnya AMP salah satunya berkat tuntutan demokrasi yang ada di Indonesia tetapi setelah itu prinsip-prinsip demokrasi tidak dijalankan. Sedikit sekali ruang bagi AMP untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini pemerintah belum berperilaku demokratis terhadap suara-suara tuntutan dari Papua.

2. Upaya dari AMP KK Yogyakarta untuk memberitahukan perihal preferensinya kepada masyarakat dan pemerintah

AMP KK Yogyakarta menyadari bahwa kepentingannya adalah besar dan membutuhkan kekuatan. Kepentingan untuk menuntut kemerdekaan dibutuhkan semangat juang yang tinggi. Selain itu, tuntutan kemerdekaan harus senantiasa diberitahukan kepada masyarakat luas dan pemerintah. Upaya

tersebut penting dilakukan untuk memberitaukan kepada pemerintah dan masyarakat secara luas bahwa gerakan menuntut kemerdekaan untuk Papua masih tetap ada. Secara tidak langsung, tuntutan untuk kemerdekaan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa di Papua sedang terjadi permasalahan mendasar yang belum bisa diselesaikan oleh negara.

Ada dua cara yang dilakukan AMP KK Yogyakarta dalam memberitahukan preferensinya terhadap masyarakat dan pemerintah. Cara tersebut termasuk dalam upaya kolektif dan upaya individual anggota AMP KK Yogyakarta. Pemberitahuan preferensi secara kolektif kepada pemerintah dan masyarakat secara luas yaitu melalui aksi-aksi massa yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta. Pemberitahuan preferensi secara kolektif juga dilakukan dengan kampanye di media massa dan media sosial AMP. Sedangkan aksi-aksi individual lebih menekankan kepada tulisan-tulisan anggota AMP di media sosial setiap individu anggota.

AMP KK Yogyakarta kerap melakukan demonstrasi pada tanggal-tanggal tertentu. Demonstrasi yang dilakukan AMP KK Yogyakarta biasanya terkait pada tanggal-tanggal tertentu yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Papua. Misalkan pada tanggal 1 Desember diperingati sebagai tanggal kemerdekaan Papua. AMP KK Yogyakarta biasanya menggelar aksi untuk menuntut kemerdekaan Papua pada tanggal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tanggal pada tanggal 1 Desember 1961, sempat dilakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat di Jayapura waktu itu. Aksi dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa di Papua sedang terjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Maka perlu melihat

sejarah pada tanggal 1 Desember dimana Papua waktu itu sudah mempersiapkan diri sebagai suatu negara yang berdaulat.

Namun di Yogyakarta sendiri, AMP KK Yogyakarta tidak bisa melakukan aksi seperti dulu karena krisis kebebasan semakin menguat. Aksi yang batal dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 menandai dimulainya krisis kebebasan terhadap mahasiswa Papua di DIY. AMP secara keseluruhan pada saat itu akan melakukan aksi damai mendukung Gerakan Pembebasan Papua atau *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Aksi rencananya dilakukan dengan melakukan long march dari asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Kusumanegara menuju titik Nol Kilometer Yogyakarta. Aksi tersebut batal dilakukan karena sebelum aksi dimulai asrama Papua sudah dikepung oleh sekelompok ormas dan polisi. Akibat kejadian tersebut mahasiswa terkurung di asrama selama dua hari.

Pasca aksi yang batal dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 stigma sebagai separatis membayangi mahasiswa Papua. Hal ini dikarenakan aksi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 tersebut dinggap sebagai aksi separatis. Anggapan tersebut kemudian di legitimasi oleh pernyataan Sultan selaku Gubernur DIY bahwa tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. AMP KK Yogyakarta waktu itu sempat merespon akan melakukan eksodus mahasiswa Papua secara besar-besaran ke Papua. Kini akibat kejadian pada tanggal 15 Juli 2016 AMP KK Yogyakarta semakin jarang untuk melakukan aksi demonstrasi.

Tahun 2017 AMP KK Yogyakarta melakukan aksi pada tanggal 27 Januari. Aksi bermaksud hendak menyusul aksi serentak di 20 kota memprotes



sweeping dan kekerasan aparat gabungan di Kabupaten Dogiyai (Tabloid Jubi, 2017). Aksi rencana dilakukan dengan melakukan long march dari Arsama di Jalan Kusumanegara menuju titik nol Kilometer. Namun aksi tidak sesuai dengan yang direncanakan karena di hadang oleh polisi, alhasil aksi hanya dilakukan di depan asrama mahasiswa Papua Kamasan. Dalam kejadian tersebut kembali terjadi represifitas aparat kepolisian yang menyebabkan tiga mahasiswa Papua terluka.

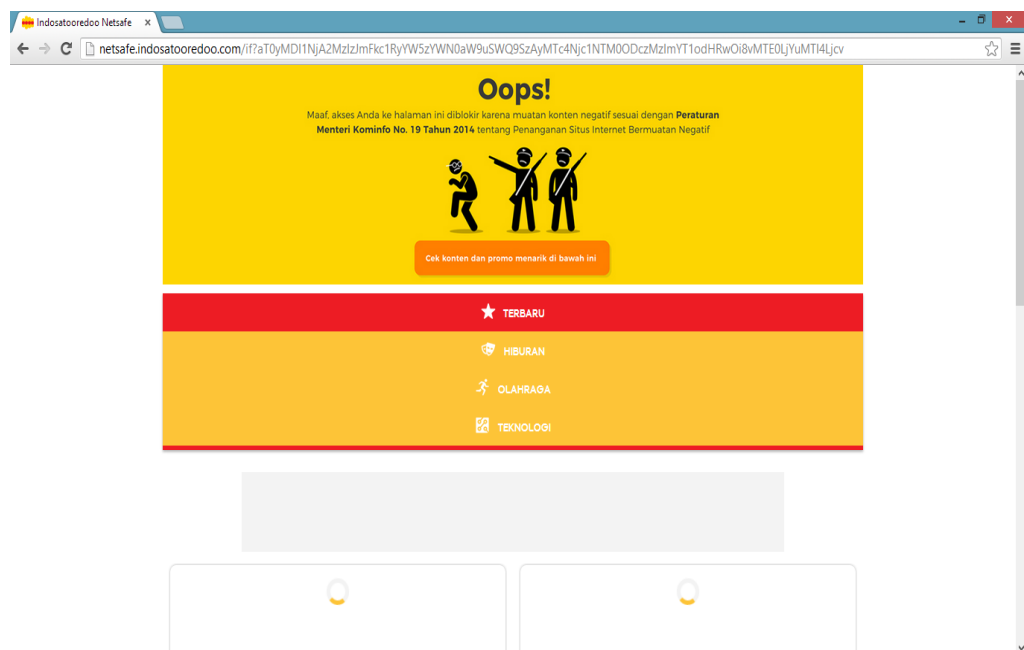
Sepanjang tahun 2014 dan 2015 AMP KK Yogyakarta beberapa kali sempat melakukan aksi di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2014 AMP KK Yogyakarta melakukan aksi memperingati hari lahir OPM. Tak berselang lama, AMP kembali melakukan aksi pada tanggal 6 Agustus 2014 untuk menuntut kemerdekaan Papua. Sedangkan di tahun 2015, AMP KK Yogyakarta melakukan aksi pada tanggal 15 Agustus 2015. Aksi tersebut menuntut diberikannya kemerdekaan untuk Papua. Aksi yang dilakukan juga mendapatkan hadangan dari sekelompok ormas. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di ruang publik semakin terbatas kepada AMP KK Yogyakarta. Namun aksi-aksi AMP di kota-kota lain masih terus dilakukan seperti di Bali, Malang, Semarang dan tentunya Jakarta. Pada tanggal 1 Desember 2017 AMP menggelar aksi di Jakarta untuk menuntut kemerdekaan Papua melalui hakmenentukan nasib sendiri. Dalam aksi tersebut ratusan demonstran menyanyikan lagu *Papua Bukan Merah Putih* “Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih” (Widhana, 2017).

Tindakan kolektif lain yang dilakukan tidak hanya AMP KK Yogyakarta tetapi juga AMP secara umum adalah menyebarkan informasi di media sosial. Media sosial sangat membantu AMP dalam melakukan penyebaran informasi dan gagasan yang diusung. Menurut Douw teknologi informasi sangat membantu dalam menyebarkan gagasan dan realitas yang terjadi di Papua. Penyebaran gagasan seluruh anggota AMP dipusatkan kedalam website [ampnews.org](http://ampnews.org). Seperti yang dikatakan Douw “kini media AMP di pusatkan menjadi satu”. Namun website tersebut diblokir oleh pemerintah sehingga sekarang tidak bisa lagi untuk di akses. Pemblokiran website AMP menunjukkan respon dari pemerintah yang semakin mengekang aksitivitas dari AMP. Hal tersebut juga membuktikan krisis kebebasan yang semakin hari kian kuat. Sebagai alternatif agar penyebaran gagasan dan invormasi terus dilakukan, AMP memuat tulisan anggotanya di blogspot. Blog yang memuat tulisan-tulisan AMP adalah <https://:aliansimahasiswawapapuanews.blogspot.co.id>.

AMP memanfaatkan teknologi untuk memberitahukan kepentingannya kepada masyarakat. Di era perkembangan teknologi setiap manusia bisa terhubung dengan manusia lain secara cepat. Penyebaran informasi selalu *update* dan dilakukan secara praktis. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan gagasan memungkinkan gagasan semakin cepat menyebar dan dapat diakses secara luas. Kini media sosial merupakan cara yang ampuh untuk mempengaruhi masyarakat. Kekuatan media sosial sebagai penggerak perubahan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. AMP memiliki media sosial facebook yang digunakan untuk menyebarkan gagasan. Facebook yang

memiliki berjuta-juta pengguna membuat setiap gagasan AMP bisa diketahui oleh masyarakat.

Tindakan individu untuk memberitahukan kepentingannya yang dilakukan anggota AMP yaitu dengan menulis. Setiap anggota AMP ditekankan untuk bisa dan berani menulis. Douw mengatakan “kami selalu menekankan anggota untuk berani menulis, yang penting tulis saja” (Douw, 2018). Dengan menulis, setiap anggota AMP dapat memberitahukan realitas yang terjadi di Papua dan kepentingan AMP. Bila dilihat dari sejarah, tulisan merupakan penggerak dari perubahan-perubahan mendasar yang ada di dunia. Dari tulisan setiap individu anggota AMP tersebut nantinya disebarluaskan melalui sosial media masing-masing individu, atau dikirim ke media massa.



Gambar 1.0, pemblokiran website ampnews.org



Gambar 2.0, Facebook, Fanspage Aliansi Mahasiswa Papua

3. Upaya dari AMP untuk menekan pembuatan keputusan pemerintah, dan respon dari pihak lain

Salah satu indikator untuk mengukur pemerintah berperilaku demokratis adalah adanya usaha untuk menekan pembuatan keputusan pemerintah. Usaha tersebut dilakukan oleh masyarakat atau dalam hal ini AMP agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Artinya bahwa tidak diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan isi kepentingan atau asal-usulnya. Setiap warga berhak untuk menekan pemerintah agar kepentingannya diakomodir dalam setiap pembuatan keputusan. Pemerintah yang berperilaku demokratis akan

membiarkan warga negara untuk menyuarakan kepentingannya dan mempertimbangkan kepentingannya secara setara.

AMP memiliki kepentingan yang cukup besar dan kuat. Kepentingan tersebut menuntut perubahan secara menyeluruh di dalam negara. AMP menginginkan Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri untuk merdeka. Keputusan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua adalah perjuangan yang kuat. Perjuangan itu harus dilakukan secara terus menerus dengan siap menerima segala resiko yang dihadapi. Douw mengatakan “kawan-kawan AMP menyadari kalau perjuangan kita ini istilahnya keputusan politik yang kita inginkan, kalau biasa kita sebut itu strong”. Jadi di dalam AMP sendiri mereka sadar bahwa tuntutan mereka bukanlah tuntutan biasa dalam pembuatan keputusan pemerintah.

Di dalam memperjuangkan kepentingannya kepada pemerintah, AMP sering menggunakan aksi-aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut pemerintah supaya Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri. AMP menginginkan dilakukan referendum untuk kemerdekaan Papua. Aksi dilakukan di setiap kota dimana kota tersebut terdapat organisasi AMP. Di Yogyakarta sendiri AMP kerap menyuarakan kemerdekaan Papua melalui aksi-aksi demonstrasi. Aksi pada tanggal 15 Juli 2016 yang berujung dengan pengepungan asrama mahasiswa Papua di kamasan membuat AMP berdialog dengan Sultan selaku Gubernur DIY. Namun Sultan justru menegaskan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta yang pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia (Kusumadewi, 2016). AMP dianggap sebagai kelompok separatis yang mengusung kemerdekaan Papua.

Pemerintah DIY terkesan melakukan diskriminasi terhadap AMP. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta biasanya dihadang oleh sekelompok ormas dan pihak kraton. Kepolisian juga kerap melakukan kekerasan dalam merespon aksi yang dilakukan oleh AMP. Selain itu, kepolisian juga membiarkan kata-kata rasialis oleh ormas yang ditujukan kepada AMP. Aksi yang dilakukan oleh AMP pada tanggal 1 Juli 2014 mencerminkan bagaimana respon pihak kraton terhadap AMP. Saat itu AMP melakukan aksi untuk memperingati hari lahir OPM dan menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pihak keamanan Kraton Yogyakarta 'Paksi Kraton' melarang mahasiswa melakukan aksi demo ke titik nol (Prabowo, 2014). Akibat pelarangan tersebut AMP hanya bisa melakukan aksi di depan Asrama mahasiswa Papua kamasan di Jalan Kusumanegara. Pengekangan terhadap AMP KK Yogyakarta memperlihatkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah DIY masih melakukan diskriminasi. Pemerintah DIY tidak mempertimbangkan secara setara kepentingan yang disuarakan oleh pemerintah.

Kondisi di Yogyakarta memberikan tantangan tersendiri bagi AMP KK Yogyakarta. AMP KK Yogyakarta berada di dalam sebuah wilayah yang masyarakatnya sangat pro terhadap negara. Sehingga narasi yang berlawanan dengan narasi resmi negara biasanya diintimidasi oleh sekelompok masyarakat jenis ini (baca: pro negara). Oleh karena itu saat AMP KK Yogyakarta melakukan aksi-aksinya kemudian dihadapkan dengan sekelompok masyarakat yang pro terhadap negara yang tidak jarang bertindak fasis.

Dialog yang dilakukan antara mahasiswa Papua dan Sultan pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua tidak sesuai dengan harapan AMP. Pengepungan asrama mahasiswa Papua pada 15 Juli 2016 menunjukkan adanya pembungkaman kepada AMP KK Yogyakarta. Untuk merespon hal itu dan menuntut jaminan keselamatan kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta, akhirnya AMP melakukan dialog dengan Sultan. Sebelumnya Sultan mengatakan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Setelah dialog dilakukan para pemuda yang tergabung didalam AMP itu tak puas karena Sultan tak mau memberikan jaminan tertulis hitam di atas putih atas keamanan orang Papua di Yogya, pun tak mau mencabut ucapan soal “separatis jangan tinggal di Yogya” (Kusumadewi, 2016). Respon pemerintah DIY kepada AMP terlihat masih adanya bentuk diskriminasi berdasarkan isi kepentingan dan asal-usul AMP. Pemerintah DIY tidak mempertimbangkan kepentingan AMP dengan setara dan terdapat tendensi pembungkaman pendapat di muka umum.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah DIY kepada AMP KK Yogyakarta mencerminkan perilaku pemerintah yang tidak demokratis. Menurut Dahl (1999) salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah masyarakat diberikan jaminan untuk mengusahakan agar kepentingannya dipertimbangkan secara setara dalam pembuatan keputusan. Dahl mengatakan bahwa pemerintah yang demokratis tidak melakukan diskriminasi berdasarkan isi kepentingan atau asal-usul masyarakat yang mengusahakan kepentingan. Kasus di Yogyakarta memperlihatkan pemerintah yang masih melakukan diskriminasi berdasarkan isi kepentingan dan asal-usul yang mengusahakan kepentingan. Sultan selaku Gubernur DIY mengatakan bahwa AMP merupakan separatis

yang tidak boleh tinggal di Yogyakarta. Lebih jauh Sultan juga tidak mau menjamin keselamatan orang Papua yang dalam beberapa kesempatan mengalami ancaman terhadap keselamatannya.

AMP KK Yogyakarta hampir selalu mendapatkan respon yang negatif saat melakukan aksi atau mengusahakan kepentingannya. Tidak jarang mereka direpresi oleh pihak keamanan saat melakukan aksi. Perlakuan kekerasan terhadap AMP tersebut sampai membuat mereka merasa biasa dan itu merupakan resiko dalam perjuangan mereka. “Jadi soal penghadangan kemudian dijauhi itu sudah menjadi resiko kawan-kawan sendiri yang memang harus dihadapi” (wawancara, 15 Januari 2018). Jaminan kepada masyarakat untuk mengusahakan kepentingannya yang masih minim dari pemerintah adalah penyebabnya. Perlakuan diskriminatif dan tindak-tindak kekerasan terus saja terjadi kepada orang Papua sampai saat ini. Perlakuan kekerasan yang dilakkan secara terus-menerus tanpa adanya perubahan pendekatan mengakibatkan tindakan tersebut dianggap wajar bahkan oleh korban sendiri. Douw mengatakan “jadi dalam setiap aktivitas misalnya ada represi dari pemerintah atau militer sendiri sudah menjadi resiko yang harus ditanggung”.

Terkait dengan jaminan dari pemerintah untuk masyarakat dalam mengusahakan kepentingannya khususnya Papua, sulit untuk tidak mengatakan bahwa pemerintah belum memberikan jaminan sampai saat ini. Tidak hanya kepada AMP, permintaan dialog dari tokoh masyarakat Papua juga tidak direspon oleh pemerintah. Pembiaran terhadap kekerasan yang terus terjadi di Papua, eksploitasi sumberdaya alam, absennya negara di dalam pemberian jaminan dasar bagi rakyat Papua membuat rasa kepercayaan terhadap



pemerintah semakin memudar. Menyoroti kekerasan yang terus terjadi di Papua, Filep karma mengatakan “berarti manusia Papua tidak ada harkat dan martabatnya di dalam negara Republik Indonesia. Kami sudah kehilangan harapan untuk pemerintah Indonesia. Sudah tidak ada kepercayaan lagi” (Adhi, 2017).

Persoalan dialog antara pemerintah Indonesia dan Papua sendiri ditanggapi dengan berbeda oleh AMP. AMP menganggap bahwa dialog tidak akan menghasilkan putusan yang terbaik bagi rakyat Papua. Mereka berkaca dari dialog nasional yang dilakukan pada 26 Februari 1999 antara pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden BJ Habibi kala itu dengan 100 tokoh masyarakat Papua. Saat itu perwakilan Papua atau yang biasa disebut dengan tim seratus meminta kemerdekaan diberikan kepada Papua. Namun pemerintah tidak menindaklanjuti secara serius permintaan dari perwakilan rakyat Papua. Bagi AMP dialog hanya akan menghasilkan *win-win solution* yang tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang terjadi di Papua. Douw mengatakan “kalau bagi kami dialog tidak akan menyelesaikan persoalan karena disana akan ada kesimpulan *win-win solution*.”

#### E. AMP KK Yogyakarta yang melampaui Politik Identitas

Menurut Maarif (2012) Secara substantif politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Artinya politik identitas memiliki kaitan secara langsung dengan kondisi subordinat kelompok tertentu. Kelompok tersebut merasa disingkirkan dan ditindas oleh

sesuatu yang lebih besar. Kelompok yang merasa dirinya dalam posisi yang tertindas kemudian muncul melalui gerakan-gerakan perlawanan. Hal itu merupakan cikal bakal kaitannya dengan kemunculan politik identitas.

Agus Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Haboddin, 2012). Dengan kata lain, politik identitas adalah gerakan politik yang mendasarkan gerakan, anggota, dan perjuangannya pada persamaan tertentu yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok yang ditentangnya. Dalam aksi-aksi politiknya, politik identitas memiliki beberapa kecenderungan. Menurut Haboddin (2012) terdapat tiga kecenderungan dalam politik identitas. *Pertama* ingin mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. *Kedua* demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Ketiga* kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai politik identitas yang ada dalam AMP KK Yogyakarta. Teori politik identitas Habbodin digunakan untuk menganalisis apakah terdapat politik identitas di dalam AMP KK Yogyakarta. Tiga kecenderungan dari politik identitas akan diuraikan di bawah ini.

1. Usaha dari AMP KK Yogyakarta untuk mendapatkan perlakuan yang sama

Adanya usaha untuk mendapatkan perlakuan yang sama tentunya ada karena praktek diskriminasi yang dilakukan. Perlakuan diskriminasi terhadap suatu kelompok mengakibatkan kelompok tersebut menjadi tersingkirkan.

Perasaan berbeda akhirnya muncul dari praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang dilakukan membuat kelompok penerima diskriminasi kehilangan makna persatuan.

Praktek diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain tetapi juga bisa dilakukan oleh negara kepada warganya. Diskriminasi dari negara terhadap warganya berupa perbedaan kebijakan, model pembangunan dan lain sebagainya. Diskriminasi yang dilakukan oleh negara akan membuat warga negara merasa dirinya menjadi bukan bagian dari negara tersebut. Sekelompok warga negara yang mendapat perlakuan diskriminasi kemudian melakukan perlawanan dengan aksi-aksi politik. Mereka menuntut diperlakukan dengan sama seperti warga negara yang lain. Biasanya politik identitas muncul sebagai respon atas diskriminasi yang dilakukan oleh negara. Sebagaimana dikatakan oleh Maarif (2012) politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

AMP KK Yogyakarta merupakan organisasi mahasiswa Papua yang fokus pada persoalan-persoalan yang ada di Papua. Realitas yang terjadi di Papua adalah faktor yang membuat AMP KK Yogyakarta bergerak. Apabila dilihat dari awal berdirinya organisasi ini maka diketahui bahwa AMP berjuang karena kondisi tidak adil yang menimpa rakyat Papua. Pelanggaran HAM, kekerasan, eksploitasi sumberdaya alam, pembunuhan yang dialami rakyat Papua melatarbelakangi berdirinya AMP. AMP merupakan jawaban dari sebagian mahasiswa-mahasiswa Papua bahwa dibutuhkan organisasi

mahasiswa yang konsisten untuk penyuarakan persoalan-persoalan yang ada di Papua.

Indonesia sebagai negara selama ini dianggap telah melakukan tindakan yang berbeda berupa diskriminasi terhadap rakyat Papua. AMP KK Yogyakarta melihat praktek diskriminasi yang dilakukan oleh negara selama ini terjadi di Papua. Douw mengatakan di dalam masyarakat (baca: Papua) terdapat perlakuan yang berbeda dari negara. Salah satu contoh diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada rakyat Papua adalah stigmatisasi. Rakyat Papua di stigma memiliki aspirasi untuk merdeka sehingga mereka layak untuk di musuhi dan di represi. Kekerasan-kekeraan yang terjadi di Papua tidak terlepas dari stigma yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Papua. Wacana yang terbangun di dalam aparatur negara khususnya militer adalah rakyat Papua sebagai separatis sehingga harus ditekan melalui pendekatan keamanan secara terus-menerus.

Menurut Douw wacana yang terbangun bahwa rakyat Papua selalu menyimpan aspirasi untuk merdeka berimplikasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Rakyat Papua kemudian dimusuhi tanpa melihat alasan kenapa mereka menginginkan merdeka. Douw mengatakan “misalkan kalau ada sedikit persoalan, misalkan ada remaja tidak sekolah malah terjerumus dalam kenakalan remaja itu kebanyakan langsung dimusuhi. Langsung dilakukan tindakan yang keras oleh militer. Apalagi kalau aktifitas-aktifitas malam biasanya” (wawancara 15 Januari 2018). Apa yang dikatakan oleh Douw memperlihatkan bahwa stigma kepada rakyat Papua menimbulkan praktek kekerasan. Militer menerjemahkan tindakan rakyat Papua yang

kurang sesuai dengan aturan misalnya sebagai tindakan yang berkaitan dengan aspirasi untuk merdeka.

Kebebasan yang terenggut dan kekerasan yang terus terjadi di Papua membuat rakyat Papua merasa tidak diperlakukan sama oleh negara. Di daerah lain selain Papua, militer tidak berlaku ekstrem seperti yang terjadi di Papua. Sejarah Papua yang diselimuti dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh militer akhirnya membentuk pikiran rakyat Papua bahwa selama ini negara hadir melalui kekerasan militer. Kekerasan yang dialami oleh rakyat Papua membentuk *memoria passionis* atau ingatan kolektif tentang penderitaan.

Stigma berimplikasi pada kekerasan yang terus terjadi di Papua. Kebebasan rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi politiknya menjadi terkekang. Lebih jauh Douw mengatakan “jadi semacam ada pandangan yang terbangun kalau orang Papua ingin merdeka maka harus dimusuhi. Stigma yang terbangun seperti itu. Perlakuan kekerasan seperti ada terus menerus” (wawancara 15 Januari 2018). AMP KK Yogyakarta melihat sampai saat ini kekerasan masih terus terjadi di Papua. Hal ini dikarenakan stigma dan tidak adanya kebebasan di Papua. Aspirasi politik rakyat Papua direspon dengan kekerasan.

Atas dasar tersebut AMP KK Yogyakarta berjuang agar rakyat Papua mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mereka mengupayakan dihentikannya kekerasan di Papua dan menuntut negara untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di tanah Papua. Perlakuan yang selama ini dilakukan negara kepada rakyat Papua membuat

mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. AMP KK Yogyakarta menuntut agar diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Apabila melihat apa yang diperjuangkan oleh AMP KK Yogyakarta sebenarnya perjuangan mereka lebih dari mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut AMP KK Yogyakarta jika Papua masih tetap berada di dalam bagian dari Indonesia maka persoalan-persoalan mendasar seperti kekerasan, pelanggaran HAM, perampasan tanah, eksploitasi sumberdaya alam di Papua tidak akan pernah selesai. Karena bagi AMP akar persoalannya adalah adanya Indonesia di Papua. Menurut AMP yang terjadi sekarang di Papua adalah kolonialisme yang dilakukan oleh Indonesia. Meskipun AMP KK Yogyakarta menyuarakan persoalan HAM dan perlakuan yang berbeda dari negara, akan tetapi tujuan mereka bukanlah hanya sekedar mendapatkan perlakuan yang sama dari negara. Tujuan AMP KK Yogyakarta adalah Papua yang merdeka, Papua yang berhak dan bebas menentukan nasib sendiri sebagai negara yang berdaulat.

## 2. Selektif dalam melestarikan budaya dan upaya menciptakan budaya baru

Papua memiliki budaya yang masih kental, terdapat suku-suku yang masih memegang tinggi warisan leluhur. Setidaknya terdapat sebelas suku besar yang ada di Papua. Suku-suku tersebut adalah Biak, Amungme (Timika), Serui (Yapen Waropen), Dani (Wamena), Sentani (Jayapura), Marind (Merauke), Me (Paniai), Moni (Paniai), Asmat (Agats), Ayamaru (Sorong),

dan Kamoro (Timika) (Widjoyo dkk, 2009). Setiap suku memiliki aturan khas masing-masing yang sakral.

Umumnya suku-suku yang ada di Papua mempunyai ikatan yang sakral terhadap tanah. Masing-masing suku memiliki tanah adat yang mereka jaga dengan sangat hati-hati. Hal ini karena tanah merupakan tempat untuk mereka tinggal dan bertahan hidup. Tanah memberikan segalanya bagi rakyat Papua. Hutan di Papua terkenal luas dan kaya akan hewan dan tumbuhan. Rakyat Papua yang masih berada di pedalaman khususnya, hidupnya sangat bergantung dengan alam. Douw mengatakan “sebenarnya orang Papua masih bergantung pada alam. Terdapat berbagai suku yang istilahnya bergantung dengan alam”.

Kebudayaan yang ada di Papua khususnya di pedalaman masih mempertahankan kebersamaan. Aktifitas ekonomi yang dijalankan masih komunal. Hutan adat dimanfaatkan untuk kehidupan bersama masyarakat adat di Papua. “kebudayaan atau aktifitas ekonomi orang Papua kalau kita bilang masih komunal atau tradisional” (Douw, 2018). Kehidupan tradisional ini memiliki nilai-nilai tertentu dimana kepentingan bersama menjadi poin utamanya. Tanah merupakan kebutuhan vital masyarakat adat di Papua. Kedudukannya menjadi penting karena tanah adalah tempat untuk mereka melakukan produksi.

Kini pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran di Papua. Pembangunan belum sampai pada tahap pembangunna manusia tetapi pembangunan yang diartikan secara simbolik. Hasilnya, tolak ukur dari pembangunan adalah masyarakat modern dimana didalamnya terdapat

gedung-gedung. Masuknya industri diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mensejahterakan Papua oleh pemerintah. Sumberdaya alam dieksploitasi sedemikian rupa untuk diambil. Bagi masyarakat adat yang masih mempunyai ikatan kuat dengan tanah dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bertahan hidup, industrialisasi jelas mencerabut mereka dari akar kehidupannya.

Pembangunan dan industrialisasi yang tidak memperhatikan aspek lokal membuat masyarakat lokal terasing di tanahnya sendiri. Terdapat corak produksi yang berbeda dari masyarakat adat yang masih menggantungkan hidup di hutan dengan industri yang lebih sering tidak akrab dengan lingkungan. Lingkungan masyarakat adat untuk mereka bertahan hidup akhirnya rusak karena eksploitasi yang sumberdaya alam yang besar-besaran di tanah Papua. Pembangunan dan industrialisasi ala pemerintah Indonesia juga kerap kali tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat Papua.

Bersamaan dengan proses pembangunan di Papua, gelombang transmigrasi besar-besaran menimpa tanah Papua. Masyarakat di luar Papua berbondong-bondong mengais kehidupan baru di Papua. Wilayah Papua yang luas dan penduduknya yang masih sedikit dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan program transmigrasi. Selain itu, pemerintah menganggap bahwa masyarakat Papua masih primitif sehingga perlu untuk dirangsang atau di beri contoh oleh masyarakat luar Papua yang sudah maju. Bias dalam mengartikan kondisi masyarakat yang “primitif” dan “maju” membuat tidak ada kesesuaian pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua.



Di dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu terdapat kebudayaan. Tak terkecuali di Papua yang memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai sistem pengetahuan, sistem makna, dan dengan demikian merupakan wacana (discourse) yang berisikan pikiran, perbincangan, dan diskursus yang “diomong-omongkan” sehingga mengkonstruksi sebuah pengetahuan di tengah masyarakat (Suryawan, 2017). Manusia adalah aktor penting yang merupakan subjek pembentuk kebudayaan. Manusia adalah pembentuk kebudayaan itu sendiri melalui dialektika yang sewaktu-waktu yang memungkinkan kebudayaan akan berubah.

Di Papua dengan diujungi pembangunan dan industrialisasi secara cepat membenturkan kebudayaan orang asli Papua. Transmigrasi yang menghadirkan pendatang di Papua juga membuat bertemunya dua kebudayaan antara orang asli Papua dengan kebudayaan yang dibawa pendatang. Kebudayaan tersebut bertemu secara langsung dengan kondisi yang frontal. Di sisi yang lain pemerintah dan para pendatang menganggap bahwa kebudayaannya lebih maju dibandingkan orang asli Papua. Ada dominasi kebudayaan yang timpang semenjak dalam pikiran. Ada proses yang timpang di dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak diberikannya kesempatan bagi rakyat Papua untuk mencipta kebudayaannya.

Pembangunan di Papua yang membawa kebudayaan baru yang menegasikan budaya dan aspek lokal mengakibatkan orang Papua mengalami marginalisasi. Marginalisasi tersebut berakar pada perbedaan pemahaman yang mendasar antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia yang

berhubungan dengan sejarah orang Papua itu sendiri dan pembangunan (Suryawan, 2017). Kebudayaan orang Papua akhirnya tersingkir dengan masuknya kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang masuk dengan menganggap dirinya sebagai kebudayaan yang lebih dominan membuat kekalahan budaya yang dialami orang asli Papua. Douw mengatakan “mereka yang masih bergantung dengan alam dengan masuknya industrialisasi itu sebenarnya kebudayaan Papua belum sampai kesana”. Ada benturan kebudayaan yang terjadi di Papua. Lebih jauh Douw mengatakan “dengan adanya kebudayaan baru yang masuk membuat kebudayaan lama bergesekan, lalu kebudayaan yang lama kalah. Posisi kekalahan budaya ini membuat orang Papua semakin tersingkir” (wawancara 15 Januari 2018).

AMP KK Yogyakarta melihat kondisi yang sekarang terjadi di Papua adalah kekalahan budaya. Kekalahan budaya orang asli Papua yang kebudayaannya dianggap minor dibanding kebudayaan baru yang masuk. Kekalahan budaya ini mengakibatkan orang Papua semakin tersingkir di tanah kelahirannya. Laporan Kompas 2007 menyebutkan bahwa industrialisasi yang masuk ke Papua membawa kebudayaan baru yang buruk bagi orang Papua. Orang Papua menjadi hobi bersenang-senang untuk sesaat. Tak hanya kehilangan sumber daya alam, tetapi warga lokalpun kehilangan diri sendiri. Suasana berubah drastis setelah penambangan dibuka. Sebagian masyarakat tradisional dengan cepat mengenal uang, minum-minuman keras, dan lokalisasi (KOMPAS, 2008). Hasil yang didapatkan dari mendulang emas biasanya dihabiskan dalam semalam untuk bersenang-senang.

Salah satu tokoh muda suku kamoro mengatakan “*Tailing* emas itu tidak hanya merusak sungai kami , tetapi juga mental masyarakat. Sungguh kami tak mau hidup seperti ini” Gergorius Okoare (35), tokoh muda Kamoro-suku asli di Timika (KOMPAS, 2008). Tailing adalah aliran pembuangan tambang emas PT Freeport Indonesia (PTFI). Apa yang dikatakan oleh Okoare menggambarkan bagaimana kondisi kebudayaan di Papua setelah masuknya penambangan. Masyarakat menjadi konsumtif dan mengalami degradasi moral. Kerusakan tidak hanya pada alam tapi mental dan moral orang Papua.

Kondisi yang demikian menjadi sebab tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Papua. Di kota kecil yang dekat dengan areal tambang PTFI, HIV/AIDS menjadi wujud nyata kehancuran orang asli Papua diguncang modernitas yang bergelimang uang dan konsumtif (KOMPAS, 2008). Kota kecil tersebut adalah Timika. Di Timika sendiri PTFI mengucurkan dana kemitraan satu persen yang diberikan kepada masyarakat. Menurut pastor Bert kasus HIV/AIDS yang ada di Timika dikarenakan kucuran dana satu persen oleh PTFI. Ada kebudayaan baru berupa uang yang dibawa oleh PTFI yang mengakibatkan budaya konsumtif orang-orang Timika. “Jadi, ada sejumlah faktor yang kebetulan bermuara di Timika. Tahun 1996, Freeport mulai dengan kucuran dana satu persen. Pada saat yang bersamaan ada lokalisasi di Kilo 10. Masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan uang, tidak tahu cara menggunakan uang, menerima kucuran uang sangat besar. Dalam praktiknya, uang itu membuat masyarakat asli menjadi konsumtif, dipakai untuk minun-minun dan prgi ke lokalisasi” kata Pastor Bert (KOMPAS, 2008).

Tersingkirnya kebudayaan Papua merupakan salah satu alasan yang membuat AMP bergerak. AMP KK Yogyakarta pada awalnya bergerak karena kekerasan di Papua yang dilakukan oleh militer. Tetapi kemudian faktor kebudayaan juga mempengaruhi mereka dalam salah satu yang diperjuangkan. Orang Papua semakin tersingkir secara kebudayaan dan aktivitas sehari-hari. “Penyingkiran kebudayaan juga membuat AMP bergerak. Awalnya juga berawal dari operasi militer yang membuat AMP bergerak. Kemudian semakin kesini tersingkirnya orang Papua dari aktivitas sehari-hari” kata Douw.

Namun AMP KK Yogyakarta mempunyai perspektif lain dalam ranah kebudayaan. Mereka tidak serta merta menganggap bahwa kebudayaan lama otomatis harus dipertahankan. Kebudayaan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Karena manusia sendiri adalah subyek kebudayaan, mereka yang menciptakan sebuah kebudayaan. Bagi AMP KK Yogyakarta budaya lama yang baik harus dipertahankan sedangkan budaya lama yang buruk harus ditinggalkan untuk membangun budaya baru yang lebih baik. “Kalau soal kebudayaan orang Papua sebenarnya terus berubah dengan kebudayaan baru yang muncul. Dari AMP sendiri kita mencoba membangun budaya baru dimana kebudayaan lama yang kami rasa baik harus dipertahankan” Kata ketua AMP Abbi Douw. AMP KK Yogyakarta melihat saat ini budaya-budaya baru yang negatif sudah masuk ke Papua. Budaya-budaya yang negatif tersebut harus terus dilawan. Douw mengatakan “Kebudayaan individualisme, kebudayaan penumpukan harta itu coba kami lawan”.

Apa yang sedang diperjuangkan oleh AMP KK Yogyakarta dengan membangun kebudayaan baru adalah paham kebudayaan yang melampaui paham kulturalisme. Paham kulturalisme adalah sebuah pendapat bahwa individual ditentukan oleh budayanya, sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup, sehingga individual tidak dapat meninggalkan dirinya di dalam budayanya (Suryawan, 2017). Menurut paham kulturalisme individu ditentukan oleh budaya, bukan individu-individu yang menentukan budaya. Paham budaya Kulturalisme menganggap individu bukan sebagai subyek kebudayaan. Suryawan berpendapat bahwa saat ini diperlukan perspektif kebudayaan yang melampaui paham kulturalisme. Rakyat Papua memerlukan ruang imajinasi seluas-luasnya untuk membentuk kebudayaannya sendiri. Bagi suryawan satu-satunya cara adalah memanfaatkan ruang-ruang keterhubungan (interkoneksi) rakyat Papua dengan dunia global (Suryawan, 2017).

AMP KK Yogyakarta yang mengusung kebudayaan baru adalah contoh dari gerakan yang melampaui paham kulturalisme. AMP menilai bahwa kebudayaan senantiasa berubah dan menjadikan individu sebagai subyek kebudayaan. Kebudayaan baru bisa dibentuk oleh setiap individu. AMP mencoba memperbaharui kebudayaan Papua dengan mengambil budaya lama yang baik sembari membangun budaya baru yang lebih baik. Artinya disini ada kebudayaan yang coba dibangun oleh AMP melalui hubungannya dengan dunia luar. AMP sebagai organisasi mahasiswa Papua yang selalu berhubungan dengan dunia luar memungkinkan untuk menjadi pembaharu kebudayaan Papua seperti yang diharapkan oleh Suryawan.

### 3. Melampaui Etnisitas

Kecenderungan terakhir yang ada di dalam politik Identitas menurut Haboddin (2012) adalah kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Kecenderungan ini membuat etnis menjadi salah satu landasan untuk berjuang. Etnis sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama dengan etnik yaitu sesuatu yang bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Etnis juga bisa diartikan sebagai rasa kedaerahan, kesukuan, dan ras yang sama.

AMP KK Yogyakarta sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya memiliki tujuan untuk kemerdekaan Papua. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua disebabkan karena berbagai persoalan yang terus dialami oleh Papua. Persoalan tersebut diantaranya pelanggaran HAM, perampasan lahan, kekerasan, marjinalisasi, diskriminasi, krisis kebebasan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan etnis, ketua AMP KK Yogyakarta Abbi Douw mengatakan bahwa etnis tidak menjadi landasan AMP untuk berjuang. Etnis dalam konteks Papua berarti kesatuan sebagai etnis Papua yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, daerah, ras, dan adat. Singkatnya Etnis Papua adalah sistem sosial dan kebudayaan Papua. Di dalam politik Identitas hal-hal tersebut dijadikan salah satu landasan untuk berjuang berupa kesetiaan yang kuat terhadap etnis.

AMP KK Yogyakarta menolak etnis sebagai salah satu landasan untuk berjuang. Selama ini mereka tidak menjadikan etnis sebagai salah satu alasan

perjuangan. Seperti yang dikatakan Douw “Kalau AMP sendiri soal etnis tidak menjadi perjuangan AMP”. Akan tetapi AMP tidak memungkiri jika di Papua saat ini terjadi pertemuan budaya yang menjurus pada pertarungan budaya antara transmigran dan orang asli Papua. Kedua kebudayaan tersebut sangat sulit untuk disatukan sehingga kerap kali berbenturan dan memicu terjadinya konflik. Bahkan kedua kebudayaan yang berbeda akhirnya menjurus pada kekalahan budaya orang asli Papua.

Membludaknya transmigran ke Papua yang membawa kebudayaan baru kemudian bertemu dengan kebudayaan asli Papua menjadi salah satu sumber permasalahan di Papua. AMP KK Yogyakarta melihat adanya kekalahan budaya orang asli Papua berupa pengikisan budaya. Namun AMP KK Yogyakarta tidak memandang persoalan itu dari segi ras dan segala macam. “Disana akan terlihat perbedaan antara masyarakat Papua dan transmigran. Disana ada perbedaan budaya yang sulit untuk disatukan dengan orang Indonesia meskipun persoalannya bukan persoalan ras dan segala macam” (wawancara 15 Januari 2018).

Terdapat kontradiksi dimana AMP KK Yogyakarta memandang etnis tidak menjadi landasan untuk berjuang tetapi mereka tidak memungkiri adanya kekalahan budaya yang disebabkan karena gelombang transmigrasi besar-besaran ke Papua. Kebudayaan Papua yang semakin dalam posisi minor sendiri juga menjadi alasan perjuangan AMP meskipun muatannya tidak terlalu besar. Disini AMP KK Yogyakarta berusaha dengan amat hati-hati untuk tidak terjebak di dalam lingkaran permasalahan yang hanya melihat etnisitas.

Menurut AMP KK Yogyakarta terjadinya kekalahan budaya di Papua disebabkan karena adanya kekuasaan yang menindas. Douw mengatakan “AMP sendiri berjuang karena ada kekuasaan yang menindas rakyat Papua itu sendiri”. Struktur kekuasaan menjadi alasan AMP untuk berjuang dibanding mempermasalahkan antara Indonesia dan Papua dari segi etnisitas. Kekuasaan yang menindas termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang meminggirkan rakyat Papua.

Adanya kekuasaan dan sistem yang menindas membuat AMP bergerak untuk merubah hal itu. Bagi AMP KK Yogyakarta permasalahan benturan kebudayaan, terhimpitnya akses ekonomi untuk orang asli Papua disebabkan karena struktur kekuasaan dan sistem. Kekalahan budaya karena gelombang transmigrasi yang membanjiri Papua disebabkan oleh kebijakan dari penguasa. Oleh karenanya alih-alih menjadikan kesetiaan etnis sebagai landasan perjuangan, AMP KK Yogyakarta lebih melihat pada sistem dan kekuasaan yang tidak benar dan perlu dirubah. “Ada pemerintahan yang menindas atau sistem yang menindas makanya AMP mencoba untuk merubah sistem itu” Kata Douw.

Pembacaan terkait permasalahan di Papua oleh AMP KK Yogyakarta yang menolak pengkotak-kotakan dari segi etnis hampir sama dengan konsep nasionalisme Papua yang dicetuskan oleh Filep Karma. Nasionalisme Papua bagi Karma adalah siapa saja yang memperjuangkan pembebasan Papua, yang bersedia berkorban untuk Papua terlepas dari latar belakang suku, etnis, dan bahasa. Mengkerdilkan bangsa Papua sebatas pada mereka yang berkulit hitam dan rambut keriting adalah rasialis. Bangsa Papua adalah tiap orang



yang mengakui bahwa dirinya orang Papua dan mencintai bangsa Papua dan rela berkorban bagi bangsa Papua, tanpa melihat suku, etnis, dan bahasa (Karma, 2014). Menurut Karma tidak semua orang yang berkulit hitam dan berambut keriting menghendaki pembebasan Papua. Ada dari mereka yang berlaku seperti kolonial atau bisa disebut penghianat.